



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



ILMCK

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV
2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Iin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	18/01 2025	
2.	Dikonsep	Rizki Azkiya, S. Pd	Pengadministrasi Umum	18/01 2025	
3.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	18/01 2025	
4.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	18/01 2025	
5.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	19/01 2025	
6.	Disetujui	Dony Prasetio, S.ST.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	20/01 2025	
7.	Disetujui	Dwi Hary Yulisetianto, S.Si.T, M.Sc	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	20/01 2025	



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Banjar, 20 Januari 2025

Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan



SIGIT MINTARSO



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029 mengusung Visi dan misi “Terwujudnya komitmen untuk membangun sinergi dan disiplin dalam menjalankan pemerintahan”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2025-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat
4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
5. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 (empatbelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sudah baik.

Dari 14 (empatbelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024, terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan terdapat tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;

3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 90% (target 90%) tercapai 100%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 45% (target 45%) tercapai 100%;
9. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan terealisasi sebesar 11 Lokasi (target 11 lokasi) tercapai 100%
10. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1200 orang (target 1200) tercapai 100%;
11. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 95% (target 95%) tercapai 100%;
12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
13. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 87 (target senilai 87) tercapai 100%;
14. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 80 (target senilai 80) tercapai 100%;

dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.3 Sumber Daya Manusia	4
I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	5
I.5 Sistematika Laporan	6
I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	10
I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	11
I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja	15
I.10 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	18
II.1TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	18
II.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	19
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	23
a.1. Definisi Indikator Kinerja	23
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	24
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	24
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	26
IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.....	27
a.1. Definisi Indikator Kinerja	27
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024.	28
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	29
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	30
IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.....	31
a.1. Definisi Indikator Kinerja.....	31
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	31
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	32
a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	34
IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	34
a.1. Definisi Indikator Kinerja	34
a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	35

a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	35
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	37
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	38
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	38
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	38
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	39
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	41
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	41
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	41
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	42
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	42
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	46
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	47
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	47
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	48
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	48
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	50
IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	51
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	51
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	51
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	52
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	53
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	54
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	54
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	54
a.3.	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	55
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	57
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	57
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	57
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	58
a.3.	Analisa Keberhasila dan/Kegagalan	58
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	59
IKK 7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	60
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	60
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	60
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	61
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	63
IKK7b	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	64

a.1.	Definisi Indikator Kinerja	64
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	64
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	65
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	66
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	67
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	67
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	68
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	68
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	72
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	73
a.1.	Definisi Indikator Kinerja	73
a.2.	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024	73
a.3.	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	74
a.4.	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	76
II.3	REALISASI ANGGARAN	77
II.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2024	77
II.3.1.1	Pagu Anggaran	77
II.3.1.2	Revisi Anggaran Tahun 2024	79
II.3.1.3.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	83
II.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024	85
II.3.2.1	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	85
II.3.2.2	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	86
II.3.2.3	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	87
II.3.2.4.	Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja	89
II.4	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
II.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)	91
II.6	Hambatan dan Kendala	92
BAB III	PENUTUP	93
III.1	Ringkasan Capaian	93
III.2	Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	95

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel.....	4
Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 -2024.....	10
Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	12
Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	21
Tabel II.2 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024.....	64
Tabel II.3 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024.....	64
Tabel II.4 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024.....	66
Tabel II.5 Rincian Revisi Per Jenis Belanja T.A. 2024.....	66
Tabel II.6 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024.....	67
Tabel II.7 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A 2024.....	68
Tabel II.8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–Tahun 2024 TriwulanIV.....	70
Tabel II.9 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2024	72
Tabel II.10 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024.....	74
Tabel II.11 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV 2024.....	75
Tabel II.12 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	77
Tabel II.13 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024.....	77
Tabel II.14 Rincian sisa Anggaran Tahun 2024.....	78
Tabel II.15 Efisiensi anggaran.....	79
Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.....4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubbag Tata Usaha BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Perjanjian Kinerja Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Perjanjian Kinerja Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Rencana Aksi 2024
Lampiran Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Revisi I Rencana Aksi 2024
Lampiran Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala BPTD Kelas II Kalsel 2024
Lampiran Revisi I Rencana Aksi 2024
Lampiran Revisi II Rencana Aksi 2024
Data Dukung per Indikator Kinerja Kegiatan



Bab I

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

I.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

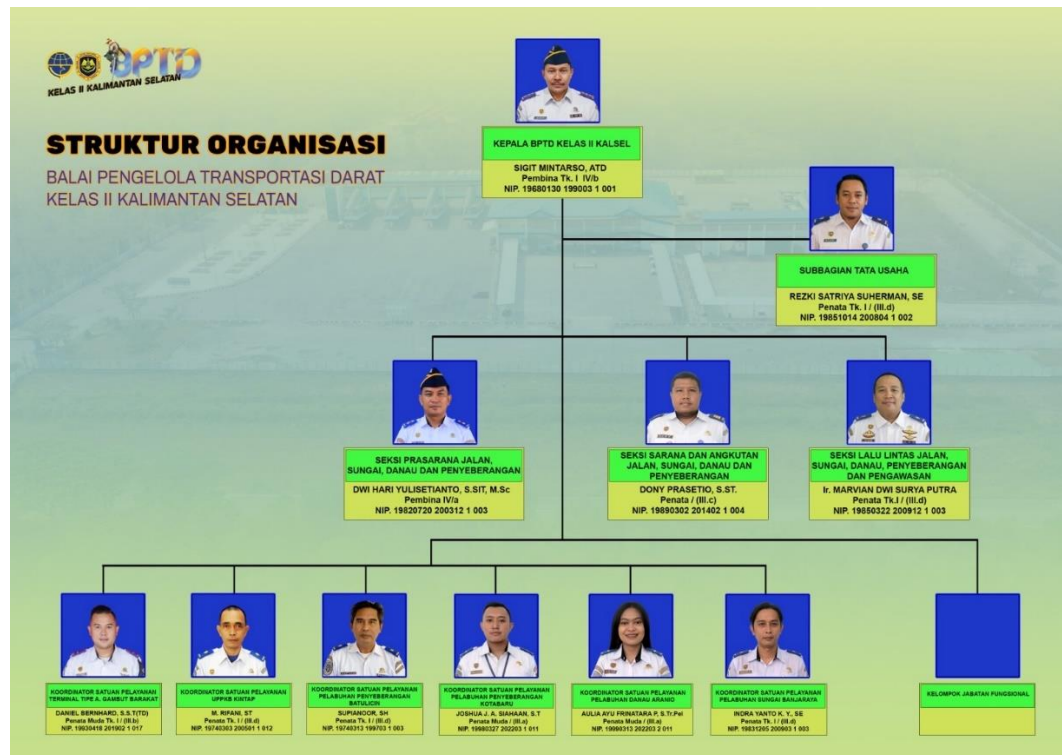
Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:
a. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan menaungi sebanyak 187 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

SDM PNS BPTD sebanyak : 62 orang
SDM CPNS BPTD sebanyak : 18 orang
SDM PPPK BPTD sebanyak : 4 orang
SDM PPNPN BPTD Sebanyak : 107 orang

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas II Kalsel

NO	NAMA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	34	5	1	38	78
2	SATPEL TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT	6	2	2	29	39
3	SATPEL PEL. PENYEBERANGAN BATULICIN	1	3	-	4	7
4	SATPEL PEL. PENYEBERANGAN KOTABARU	2	-	-	5	7
5	SATPEL PEL. DANAU ARANIO	3	1	-	3	7
6	SATPEL PEL. SUNGAI BANJARRAYA	6	-	-	5	11
7	SATPEL UPPKB KINTAP	8	1	1	11	22
8	SATPEL UPPKB TABALONG	2	6	-	8	16
JUMLAH		62	18	4	107	187

I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan cukup besar sehingga BPTD Kelas II Kalimantan Selatan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalandan angkutan umum;
4. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
5. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- I.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja 2024
- I.10 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja 2024

BAB II Capaian Kinerja

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi

A.1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

- A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

- A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

- A.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat

B.1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan transportasi darat

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.4. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan Transportasi Jalan

- C.4.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.5. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- C.5.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.5.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.5.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.6. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- C.6.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.6.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.6.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

E.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2 Realisasi Anggaran

II.2.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Revisi Anggaran Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.2 Ringkasan Capaian

III.3 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;
6. Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2024;
8. Lain – lain yang dianggap perlu.

I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yangtelah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktotar Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 -2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2020-2024
1	SK1	Konektivitas Transportasi darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A danTerminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yangberoperasi	Lokasi	4
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM) di Terminal tipe-A	%	90
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM) di SDP	%	100

3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
			IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	25
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	3400
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80

1.7 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I. 3 Rencana Kinerja Tahunan 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100

			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
			IKK3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	lokasi	15
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	lokasi	1
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

1.8 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 104.829.325.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	lokasi	15

		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200	
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan DaratAkuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 21.509.595.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.918.509.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 50.660.331.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 17.632.850.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 150.000.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan UmumTransportasi Darat	Rp. 6.573.395.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan UmumTransportasi Darat	Rp. 4.384.645.000

I.9 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja

Dengan terjadinya pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan pergantian Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, maka mengakibatkan disesuaikannya kembali Perjanjian kinerja pada bulan Juni Tahun 2024 dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi 8 DIPA Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.104.829.325.000,-

Tabel I. 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	lokasi	15
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1	
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan DaratAkuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 21.509.595.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.918.509.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 50.660.331.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 17.632.850.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 150.000.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan UmumTransportasi Darat	Rp. 6.573.395.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan UmumTransportasi Darat	Rp. 4.384.645.000

I.10 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian Kinerja Revisi II pada bulan Desember 2024 dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi DIPA ke-16 DIPA Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 Tanggal 14 November 2024. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.105.980.240.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe- A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutanpenyeberangan	%	100

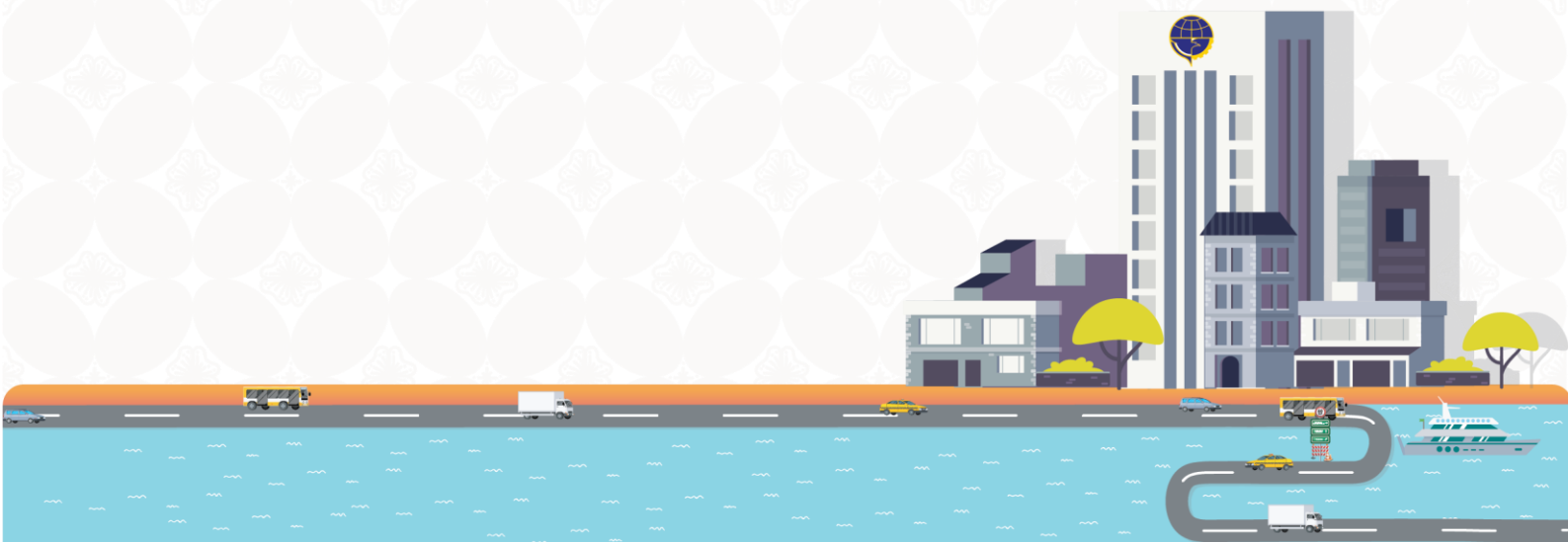
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
2	SK2		Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
			Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4		Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
			Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	lokasi	11
			Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
			Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
			Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	1
4	SK5		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1		Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 20.269.208.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.918.507.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 50.083.929.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 16.635.372.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 150.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.573.395.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 8.349.829.000
	JUMLAH	Rp. 105.980.240.000

II.1

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



II.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

1) Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

2) Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

3) Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas II Kalimantan Selatan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya:

Tabel II.1 Pengukuran Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					62,5%			75,78%			88,53%			100%
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	25	25%	100	48,15	48,15%	100	75	75%	100	100	100%
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	25	25%	100	55	55%	100	79,12	79,12%	100	100	100%
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat					25%			95,13%			95,13%			100%
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	22,5	25%	90	81,25	90,27%	90	81,25	90,27%	90	90	100%
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	38,25	25%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat					37,04%			53,91%			101%			100%
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	25	25%	100	50	50%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	45	12,48	172,26%	45	22,5	150%	45	33,75	125%	45	45	100%
IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	lokasi	11	11	0	0%	11	9	81%	11	11	100%	11	11	100%
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	1200	1200	0	0%	1200	0	0%	1200	1200	100%	1200	1200	100%
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	95	23,75	25%	95	38,46	40,48%	95	77	81%	95	95	100%
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%	1	0,23	23%	1	1	100%	1	1	100%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					102,35%			102,35%			102,35%			100%
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	87	87	87	100%	87	87	100%	87	87	100%	87	87	100%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					87,03%			71,25%			75%			100%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80	80	69,62	87,03%	80	57	71,25%	80	60	75%	80	80	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						62,78%			79,68%			92,40%			100%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						37,30%			70,75%			88,29			100%
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						3			4			8			13
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						10			8			7			0

Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 14 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Penjelasan capaian IKP untuk setiap Sasaran Program adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe - A dan terminal barang yang beroperasi
3. IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi



IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Juga merupakan Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat.

Adapun Keperintisan Angkutan Jalan Nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum DAMRI pada sejumlah trayek di wilayah daerah Kalimantan Selatan yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani. Adapun data trayek yang dilayani pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel II. 3 Trayek Layanan Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024

No	Rincian Trayek	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (km)
1	Terminal Pelaihari - Pantai Takisung - Tabanio	360	37
2	Terminal Pelaihari - Pantai Batakan	360	39
3	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	720	66
4	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado	720	152
5	Terminal Pelaihari - Jorong	360	36
6	Kotabaru - Serongga - Batulicin	672	75
Total		3.192	405

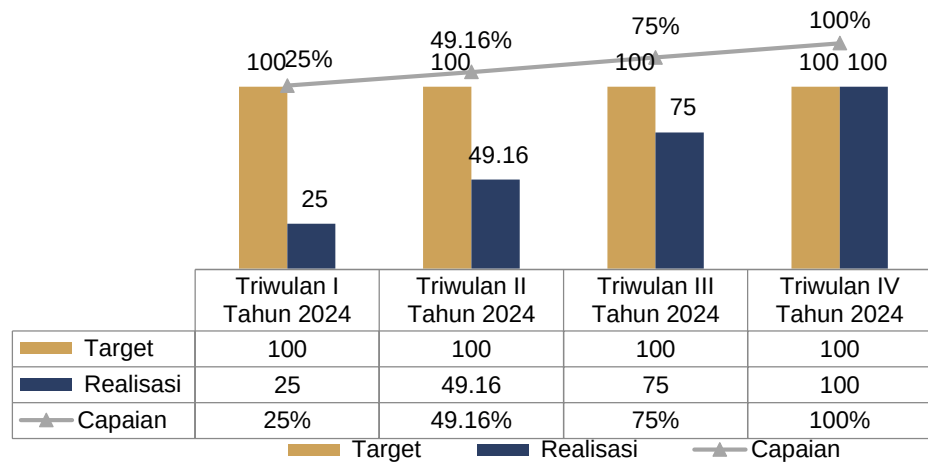
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel II.3, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2024, terdapat 6 trayek yang dilayani pada Perum DAMRI yang ada di Kalimantan Selatan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1.** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.





Gambar III.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	100	100	100	100
2	Realisasi	25	49,16	75	100
3	Capaian	25%	49,16%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan BPTD Kelas II Kalsel terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan I sebesar 25%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 25%.
- Pada triwulan II, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan II sebesar 49,16%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 49,16%.
- Pada triwulan III, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan



jalan pada triwulan III sebesar 75%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 75%.

- Pada triwulan IV, target persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, adapun sebanyak 6 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis pada Wilayah daerah Kalimantan Selatan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan = Jumlah

$$\text{Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Jumlah Rit Realisasi pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Rit yg direncanakan}} \times 100\%$$

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Realisasi rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.5 Realiasi Kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024

No	Rincian Trayek	Jumlah Rit/Tahun	Jarak (km)	Total Realisasi s.d Des
1	Terminal Pelabuhan - Pantai Takisung - Tabanio	360	37	360
2	Terminal Pelabuhan - Pantai Batakan	360	39	360
3	Terminal Gambut Barakat - Marabahan	720	66	720
4	Terminal Gambut Barakat - Terminal Rantau - Loksado	720	152	720
5	Terminal Pelabuhan - Jorong	360	36	360
6	Kotabaru - Serongga - Batulicin	672	75	672
Total		3.192	405	3.192

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{3.192}{3.192} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah dan efisien.
4. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan;
3. Makin maraknya pengelolaan kendaraan komersil dengan kemudahan aksesnya.
4. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh.



- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2024 adalah 100% dimana untuk menghasilkan persentase capaian yaitu realisasi dibagi target dikali 100 persen. Ini dapat diartikan bahwa kinerja terkait Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2024 mencapai target yang sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024 yaitu Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional) Subsidi Oprasional Bus Perintis senilai Rp. 4.915.464.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 4.817.217.000 atau mencapai 98% dengan nomenklatur POK : Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), kode anggaran (4637.QAH.001).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
2. Dapat terus mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
3. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
4. Dapat terus mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
5. Selalu menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
6. Dapat mewujudkan konektivitas transportasi darat.
7. Melakukan sosialisasi terkait trayek yang dilalui angkutan perintis bagi Pemda setempat dan juga masyarakat yang dijangkau oleh angkutan perintis tersebut.



a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe-A Gambut Barakat Merupakan Terminal Induk dimana merupakan terminal asal-tujuan yang terletak di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas lahan 4,8 ha dan luas Bangunan Terminal sebesar 3.417 M². Melayani trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (ANGKOT).

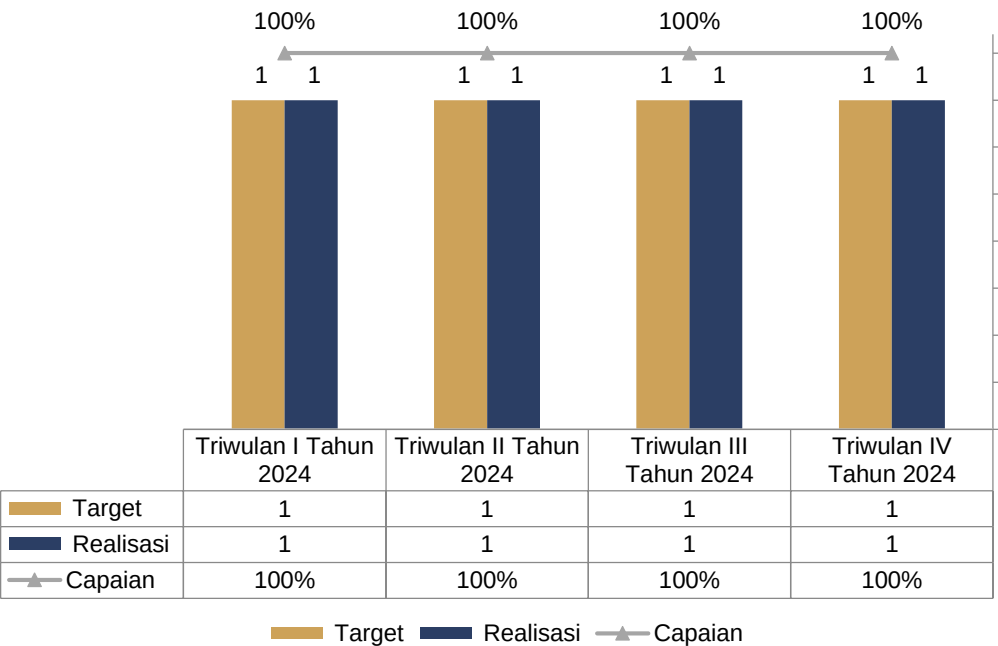
- Fasilitas Utama
 - a. Jalur Keberangkatan
 - b. Jalur Kedatangan
 - c. Ruang Tunggu penumpang
 - d. Area Parkir Penjemput / Pengantar
 - e. Perlengkapan Jalan
 - f. Loker Penjualan Tiket
 - g. Pusat Informasi
 - h. Media Informasi
 - i. Gedung Utama / Kantor Terminal
 - j. Toilet Umum
 - k. Gudang
- Fasilitas Penunjang
 - a. Klinik
 - b. Fasilitas Keamanan
 - c. Gerai ATM
 - d. Endapan Bus
 - e. Kios/Kantin
 - f. Masjid
 - g. Wifi
 - h. Tempat bermain anak

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Realisasi kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan untuk perbandingan realisasi Terminal Barang yang beroperasi saat ini BPTD Kelas II Kalsel belum



memiliki Terminal Barang. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.



Gambar II.2. Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

Berikut ini rincian capain setiap triwulan untuk Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024.

Tabel II.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	1	1	1	1
2	Realisasi	1	1	1	1
3	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan I sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebesar 100%.



- Pada triwulan II, target Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan II sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi 100%.
- Pada triwulan III, target jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada triwulan III sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 1 lokasi. Realisasi jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada triwulan IV sebesar 1 lokasi. Sehingga capaian jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada tahun 2024 di Terminal tipe-A Gambut Barakat Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe-A;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.



• **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
IKK 1.3 = 1 Lokasi

Tabel III. 10 Data Produksi Angkutan dan Penumpang Terminal Tipe-A Gambut Barakat Jan-Des 2024

No	Bulan	AKAP				AKDP				TOTAL			
		Kedtg		Kebrkt		Kedtg		Kebrkt		Kedtg		Kebrkt	
		Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Kndr	Pnp	Knd	Pnp	Knd	Pnp
1	JANUARI	321	8938	339	7173	7905	64129	7905	63182	8226	73067	8244	70355
2	PEBRUARI	281	6466	284	5133	7395	60029	7365	59338	7676	66495	7649	64471
3	MARET	283	6260	303	5106	7905	64698	7905	63808	8188	70958	8208	68914
4	APRIL	490	15245	487	10508	7650	62672	7650	62611	8140	77917	8137	73119
5	MEI	292	6569	311	5375	7905	67150	7905	67432	8197	73719	8216	72807
6	JUNI	318	8905	317	6483	7631	65326	7631	64900	7949	74231	7948	71383
7	JULI	318	8711	335	7039	7905	66012	7905	66078	8223	74723	8240	73117
8	AGUSTUS	257	6502	270	4422	7389	61363	9443	61118	7646	67865	9713	65540
9	SEPTEMBER	280	7084	299	4831	6693	75446	6693	73961	6973	82530	6992	78792
10	OKTOBER	277	6571	290	4712	6660	81403	6660	81402	6937	87974	6950	86114
11	NOPEMBER	285	6177	272	4337	6660	81580	6660	80926	6945	87757	6932	85263
12	DESEMBER	333	9247	357	6424	6882	87670	6882	87990	7215	96917	7239	94414
	JUMLAH	3744	96884	3873	71650	88802	840190	90826	835448	92546	937074	94699	907098

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meramaikan terminal tipe-A Gambut Barakat dalam tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	UPAYA YANG DILAKUKAN	TUJUAN	CAPAIAN
1.	Sosialisasi kepada PO yang masih melakukan penjualan tiket diluar terminal	Agar PO berkantor dan menjual tiket di dalam Terminal	Beberapa PO sudah melakukan kerjasama sewa loket di terminal
2.	Edukasi dan himbauan kepada penumpang dan masyarakat tentang aturan terminal	Menjadikan fungsi terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang	Masyarakat mulai sadar memahami dan mematuhi aturan
3.	Penegakan hukum dan penindakan terhadap angkutan umum yang melanggar aturan	Menertibkan Angkutan Umum agar tertib dan masuk ke terminal	Masih banyak angkutan umum yang melakukan pelanggaran (tidak masuk ke terminal dan masih menurunkan penumpang di loket luar terminal)



4.	Promosi dan ekspos lingkup terminal lewat media social dan media cetak	Agar masyarakat mengetahui lingkup dan memfungsikan terminal	Postingan kegiatan terminal lewat facebook, Instagram dan TV Nasional.
----	--	--	--

Realisasi kinerja terhadap aspek sebagai indikator di Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Gambut Barakat sudah mencapai 100% (maksimal) di tiap tahunnya.

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi antara lain:

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum.
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

• Faktor Kendala

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi antara lain:

1. Kebersihan di terminal masih kurang maksimal
2. Lokasi jauh dari jalan utama
3. Fasilitas terminal masih ada yang rusak seperti toilet umum

• Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2024 adalah 100% dimana untuk menghasilkan persentase capaian yaitu realisasi dibagi target dikali 100 persen. Ini dapat diartikan bahwa kinerja terkait Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi mencapai target yang sempurna, sedangkan capaian terminal barang yang beroperasi saat ini BPTD Kelas II Kalsel belum memiliki terminal barang.

Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$



- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 yaitu Terminal Penumpang Tipe-A Operasional Terminal Tipe-A Gambut Barakat senilai Rp. 1.630.789.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 1.574.924.795 atau mencapai 96,57% dengan nomenklatur POK : Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, kode anggaran (4638.CDP.040).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
3. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
4. Meningkatkan pendapatan PNBPN di Terminal Tipe-A.

IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah pelayanan angkutan penyeberangan bersubsidi guna membangun konektivitas antar pulau di Kalimantan Selatan. Pelayanan angkutan penyeberangan perintis menggunakan kapal ferry dari perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin. Kegiatan ini berguna untuk mendukung kegiatan perekonomian serta sosial politik masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel III. 14 Lintas Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun 2024

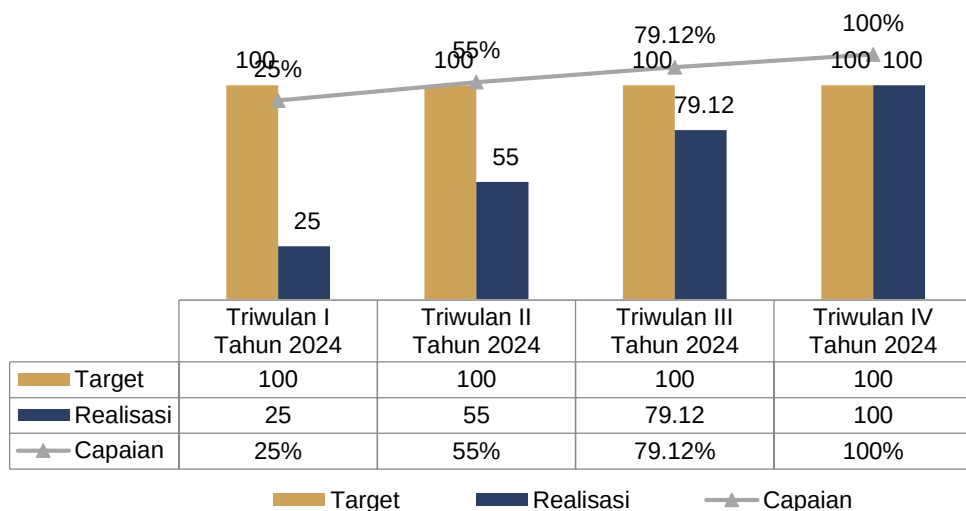
No	Rincian Lokasi	Volume	Satuan	Capaian s.d Desember (KM)
1	Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku.	680	Trip	680
Total		680	Trip	680

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel III. 13, dapat diketahui bahwa untuk Tahun Anggaran 2024, terdapat 1 Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis yang dilayani pada PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin yang ada di Kalimantan Selatan.



a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar II.3. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024.

Tabel II. 15 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	100	100	100	100
2	Realisasi	25	55	79,12	100
3	Capaian	25%	55%	79,12%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan

Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan I sebesar 25. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 25%.

- Pada triwulan II, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan II sebesar 55. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 55%.

- Pada triwulan III, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan III sebesar 79,12. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 79,12%.

- Pada triwulan IV, target Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada triwulan IV sebesar 100. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7330 Tahun 2023 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini ditetapkan dasar untuk pengawasan dan pelayanan terhadap operasional angkutan perintis Pelabuhan Penyeberangan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.



- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

No	Rincian Lokasi	Volume	Satuan	Capaian s.d Desember (KM)
1	Lintas Pulau Laut Timur – Pulau Sebuku.	680	Trip	680
Total		680	Trip	680

Dengan demikian Persentase Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{680}{680} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat;
2. Efisiensi waktu tunggu dengan waktu keberangkatan kapal;
3. Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir;
4. Kepastian jam operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
5. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat Pulau Sebuku;
6. Memastikan jumlah ketersediaan kapal feri yang memadai sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
7. Kecakapan awak kapal yang telah mumpuni dibuktikan dengan adanya sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku;
8. Tersedianya ruang tunggu yang memadai untuk pengguna jasa ;
9. Pengecekan berkala fasilitas dalam kapal untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan penumpang;
10. Pengecekan berkala kondisi kapal melalui pemeriksaan SPM.



- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kendala terhadap indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Jadwal Oprasional tidak Terlalu banyak;
2. Cuaca yang buruk, angin kencang dan ombak yang tinggi dapat menyebabkan penundaan keberangkatan kapal;
3. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
4. Pelabuhan penyeberangan perintis seringkali memiliki keterbatasan fasilitas, termasuk dermaga yang tidak memadai, area parkir yang terbatas, dan fasilitas penunjang lainnya yang minim.
5. Keterbatasan armada kapal yang tidak sebanding dengan jumlah lonjakan penumpang;
6. Keterbatasan jumlah petugas dan awak kapal;
7. Keterbatasan Ketersediaan Informasi terkait Jadwal dan pemesanan Tiket.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tahun 2024 adalah 100%. Dimana persentase capaian merupakan hasil realisasi dibagi target. Yang mana nilai pada realisasi adalah 100% dibagi nilai target adalah 100% dan dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 berhasil mencapai target dengan sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 yaitu Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp. 3.873.131.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 3.866.954.313 atau mencapai 99,84%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat;
5. Pemenuhan pengecekan berkala melalui SPM kapal penyeberangan pada lintasan perintis.
6. Perbaikan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang ada untuk mengakomodir arus penumpang dan kendaraan;
7. Penyediaan informasi yang mudah diakses oleh pengguna jasa terkait jadwal dan pemesanan tiket;
8. Memastikan tingkat kecakapan awak kapal penyeberangan perintis melalui pengecekan secara berkala sertifikat kompetensi yang dimiliki awak kapal;
9. Koordinasi yang baik antar pihak operator, Pemda dan BPTD dalam penetapan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting sangat penting;
10. Pengaturan Pola Arus Lalu Lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan untuk kelancaran layanan.

IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

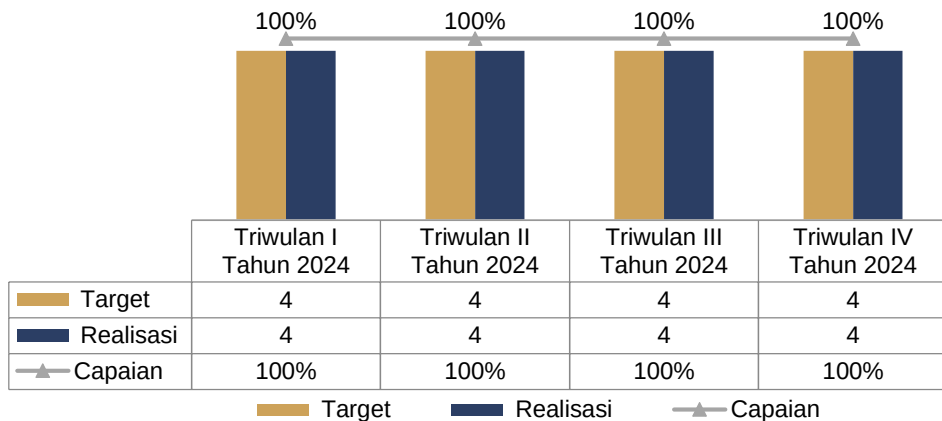
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang beroperasi dengan 13 (tigabelas) Wilayah kerja. Yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan SDP terhadap keselamatan transportasi angkutan umum berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM;



a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 4 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6.** Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II.4. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

Tabel II. 19 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	4	4	4	4
2	Realisasi	4	4	4	4
3	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan I sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan II, target Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi



pada triwulan II sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

- Pada triwulan III, target Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan III sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yang ditetapkan sebesar 4 lokasi. Realisasi jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi pada triwulan IV sebesar 4 lokasi. Sehingga capaian jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dimana BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat 4 (empat) Satuan Pelayanan SDP yang beroperasi dengan 13 wilayah kerja. Adapun Pelabuhan tersebut antara lain

NO	Satuan Pelayanan SDP	Wilayah Kerja	Dasar Hukum
1.	Penyeberangan Batulicin	- Penyeberangan Tanjung Serdang	PM 6 Tahun 2023
2.	Penyeberangan Kotabaru	- Penyeberangan Pulau Laut Timur - Penyeberangan Stagen - Penyeberangan Tarjun	PM 6 Tahun 2023
3.	Pelabuhan Sungai Banjaraya	- Pelabuhan Sungai Pasar Baru - Pelabuhan Sungai Ujung Murung - Pelabuhan Sungai Pasar Lima - Pelabuhan Sungai Alalak - Pelabuhan Sungai Jelapat	PM 6 Tahun 2023
4.	Pelabuhan Danau Aranio		PM 6 Tahun 2023

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terhadap meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 4 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun



sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi
IKK 1.6 = 4 Lokasi

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

1. Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:
2. Petugas yang kompeten dibidangnya
3. Koordinasi dan kerjasama yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait
4. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja (performance evaluation) yang baik dan berkala untuk pelaksanaan kegiatan, sebagai instrumen pembantu untuk pengambilan keputusan
5. Infrastruktur pelabuhan yang memadai
6. Pelayanan yang berkualitas
7. Pengaturan jadwal kapal yang efektif dan efisien
8. Mutu sarana dan prasarana baik kapal maupun pelabuhan

- **Faktor Kendala**

Adapun Faktor Kendala terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. SDM yang tidak memadai
2. Kerjasama dan koordinasi yang lemah antar stakeholder
3. Kurangnya pengawasan dan evaluasi
4. Infrastruktur yang tidak memadai
5. Pelayanan yang buruk



6. masih perlu peningkatan fasilitas kantor
7. Keadaan Alam Seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar pelabuhan
8. Kerusakan pada kapal dan peralatan pelabuhan
9. Human error (kesalahan manusia)

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil mencapai target sempurna atau mampu memenuhi target.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 yaitu Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan senilai Rp. 1.087.720.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 826.327.810 atau mencapai 75,97% dengan nomenklatur POK : Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola dengan kode anggaran (4638.CDP.045.051).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan
4. Peningkatan infrastruktur pelabuhan SDP
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dibidangnya
6. Penguatan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder terkait
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan kesiapan peralatan pelabuhan sesuai dengan karakteristik masing – masing pelabuhan
8. Membuat rencana kerja yang belum terlaksana di pelabuhan SDP
9. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana pelabuhan SDP.



Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya pelayanan transportasi darat*

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja 2: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) si pelabuhan SDP

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

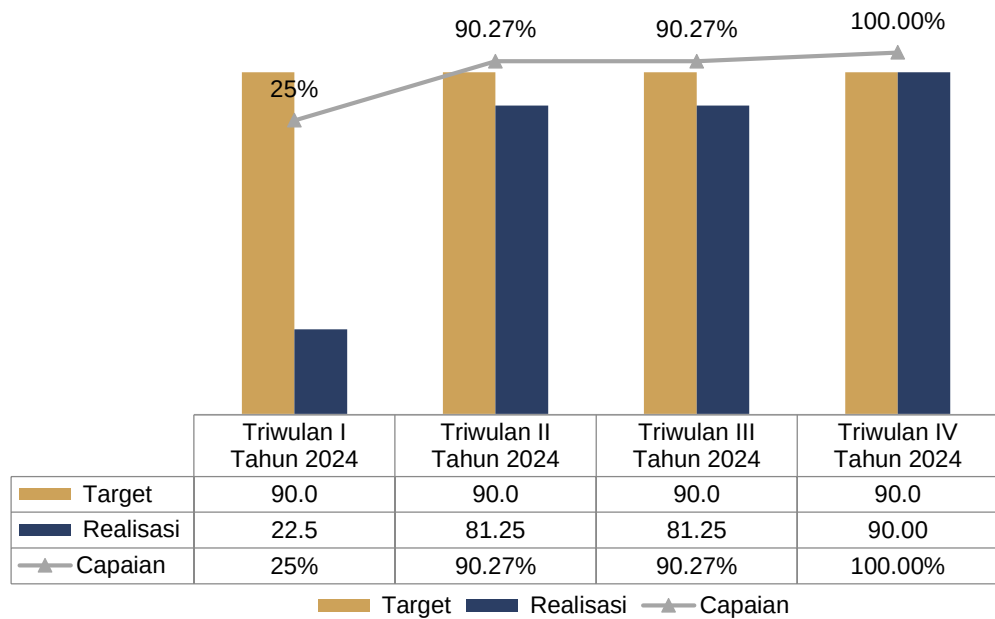
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan.

Jenis Pemeriksaan	Uraian
SPM Terminal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesetaraan
	Aspek Keteraturan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.**





Gambar II.5. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024.

Tabel II. 22 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	90	90	90	90
2	Realisasi	22.5	81,25	81,25	90
3	Capaian	25%	90,27%	90,27%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan I sebesar 22,5%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 25%.



- Pada triwulan II, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan II sebesar 81,25%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A 90,27%.
- Pada triwulan III, target pada kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan III sebesar 81,25%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 90,27%.
- Pada triwulan IV, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A yang ditetapkan sebesar 90%. Realisasi jumlah Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A pada triwulan IV sebesar 90%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 90 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Namun pada tahun berjalan ternyata untuk realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A hanya tercapai 90,27% dari target 90. Dikarenakan memang kesalahan administrasi kami yang kurang teliti, maka pada Revisi II tidak dilakukan penyesuaian target kembali sehingga capaian yang didapat kurang maksimal.



- **Realisasi Kinerja**

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2024 tercapai 100% dengan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A Gambut Barakat. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

LAPORAN TAHUN 2024
STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT
TERMINAL TIPE A GAMBUT BARAKAT

No.	Jenis Pelayanan	Nilai
1	Keselamatan	15
2	Keamanan	15
3	Kehandalan/ Keteraturan	15
4	Kenyamanan	15
5	Kemudahan/Keterjangkauan	15
6	Kesetaraan	15
Jumlah		90

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Komitmen Petugas dalam Pelayanan yang ada di Terminal Tipe-A
2. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Terpenuhinya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal
4. Pelaksanaan operasional terminal Tipe-A sesuai Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan;
5. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Masih ada Fasilitas yang belum terpenuhi
2. Kurangnya SDM yang ada
3. Keadaan Lapangan lainnya seperti kurangnya ruang tunggu untuk penumpang
4. Kurangnya monitoring terhadap fasilitas di terminal dan operasional kendaraan yang beroperasi.



- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2024 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari nilai Realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A tahun 2024 belum memenuhi target capaian dengan sempurna.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pelaksanaan} \\ \text{Standar Pelayanan Minimal} \\ \text{(SPM) di Terminal Tipe-A} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A Tahun 2024 yaitu Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana senilai Rp 188.600.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 173.572.500 atau mencapai 92,03% dengan nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, kode anggaran (4640.FAE.923.D).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas Terminal Tipe-A;
2. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban Terminal Tipe-A;
3. Melaksanakan Pelayanan di Terminal Tipe-A sesuai dengan SPM yang ada;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

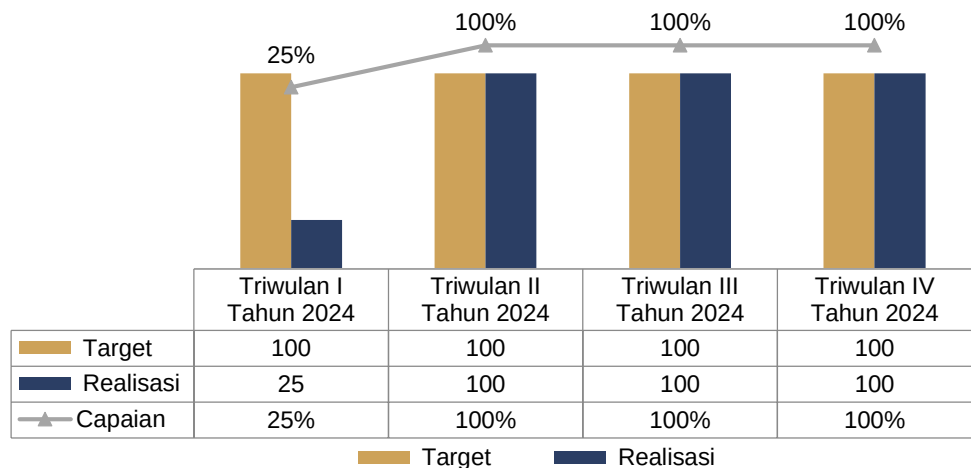


Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Uraian
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesenjangan
	Aspek Keteraturan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024.



Gambar II.6. Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan tahun 2024.



Tabel III. 26 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	100	100	100	100
2	Realisasi	25	100	100	100
3	Capaian	25%	100%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di di pelabuhan SDP Tahun 2024 di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan I sebesar 25%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 25%.
- Pada triwulan II, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan II sebesar 100%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP 100%.
- Pada triwulan III, target pada kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan III sebesar 100%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Direktur Jenderal



Perhubungan Darat Nomor KP. 5062/AP005/DRJD/2020 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, pedoman ini menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP di bawah Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh pengelola pelabuhan penyeberangan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mencapai standar yang ditetapkan maka ditetapkan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Pada hal ini telah dilakukan rekapitulasi hasil SPM di Pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan pelabuhan penyeberangan :

NO	Pelabuhan	Nilai	Klasifikasi
1.	Pelabuhan Penyeberangan Batulicin	61	C (cukup)
2.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang	51	C (cukup)
3.	Pelabuhan Penyeberangan Stagen	25	D (kurang baik)
4.	Pelabuhan Penyeberangan Tarjun	31	D (kurang baik)
5.	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Laut Timur	58	C (cukup)
6.	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sebuku	51	C (cukup)
7.	Pelabuhan Danau Aranio	29	D (kurang baik)



8.	Pelabuhan Sungai Banjaraya	41	C (cukup)
----	----------------------------	----	-----------

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Persentase pelaksanaan} \\ \text{Standar Pelayanan Minimal} \\ \text{(SPM) di pelabuhan SDP} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{8} \times 100\% \\ &= 100\end{aligned}$$

- **Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan koordinasi peraturan dengan Stakeholder Terkait untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM):
 - Mengadakan sosialisasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
 - Mengadakan pertemuan atau forum koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dan stakeholder terkait lainnya;
 - Membahas strategi untuk memastikan pelabuhan penyeberangan memenuhi standar.
2. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait untuk Memelihara Fasilitas Pelayanan Pelabuhan:
 - Memastikan pemeliharaan dilakukan secara teratur;
 - Menyusun mekanisme pemantauan kondisi fasilitas secara berkala dan tindak lanjut yang diperlukan.
3. Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan SDP Setiap Tahun:
 - Menyusun jadwal dan personil untuk kegiatan pemeriksaan SPM di Pelabuhan SDP;



- Melaksanakan kegiatan pemeriksaan SPM di Pelabuhan SDP dan melaporkan hasil ke pusat.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Penyeberangan Setiap Tahun:
 - Menyusun rencana monitoring dan evaluasi terkait hasil Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP;
 - Menganalisis hasil monitoring untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada operator pelabuhan SDP.
 5. Penerapan Sanksi Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku:
 - Memastikan penggunaan pedoman yang telah ditetapkan (KP. 5062/AP005/DRJD/2020) untuk menilai kinerja pelabuhan.
 - Memberlakukan sanksi kepada pengelola pelabuhan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman (KP. 5062/AP005/DRJD/2020).

Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja sama yang efektif antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, pemerintah daerah, pihak swasta, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP sesuai dengan pedoman yang berlaku.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP antara lain:

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP mengalami kendala bilamana cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan.
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain;
4. Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dan penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan



- SDP sehingga hasil atau nilai yang diperoleh kurang maksimal;
5. Masih banyaknya fasilitas pelabuhan SDP yang belum tersedia atau rusak sehingga tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan SDP;
 6. Terbatasnya biaya operasional, perawatan, pemeliharaan Pelabuhan SDP yang disediakan oleh pengelola pelabuhan SDP sehingga sulit memenuhi SPM sesuai dengan peraturan;
 7. Pengelola pelabuhan SDP belum memahami terkait Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 5062/AP005/DRJD/2020 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
 8. Kerjasama dan koordinasi yang lemah antar stakeholder;
 9. Kurangnya pengawasan dan evaluasi;
 10. Pelayanan yang buruk.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 adalah 100%. Dimana Hasil persentase berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya capaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2024 memenuhi target yang sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2024 yaitu yaitu Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana senilai Rp 188.600.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 173.572.500 atau mencapai 92,03% dengan nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, kode anggaran (4640.FAE.923.D).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Pelabuhan sesuai Standar:
2. Memastikan semua fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan pelabuhan, seperti dermaga, terminal, tempat tunggu, dan fasilitas lainnya, memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut SPM kepada pengelola pelabuhan dengan melakukan perbaikan atau perawatan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi fasilitas dan melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai kebutuhan.
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM:
5. Melakukan monitoring yang efektif untuk mengawasi implementasi Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP;
6. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi area-area perbaikan dan menyusun rencana tindak lanjut yang diperlukan.
7. Pelatihan dan Pengembangan SDM:
8. Mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi petugas pemeriksaan SPM Pelabuhan SDP terkait agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menilai dan melaksanakan Standar Pelayanan Pelabuhan dengan tepat.
9. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait:
10. Membangun kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak swasta, dan organisasi setempat untuk mendukung implementasi SPM.
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
12. Peningkatan infrastruktur pelabuhan SDP;
13. Peningkatan kualitas layanan SDP
14. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pelayanan di pelabuhan SDP, serta mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan perhatian yang terus-menerus terhadap perawatan fasilitas, monitoring pelaksanaan, dan pengembangan sumber daya manusia, pelabuhan penyeberangan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi harapan pengguna.



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pelayanan transportasi darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan
4. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
5. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
6. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal.

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda.

Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi :

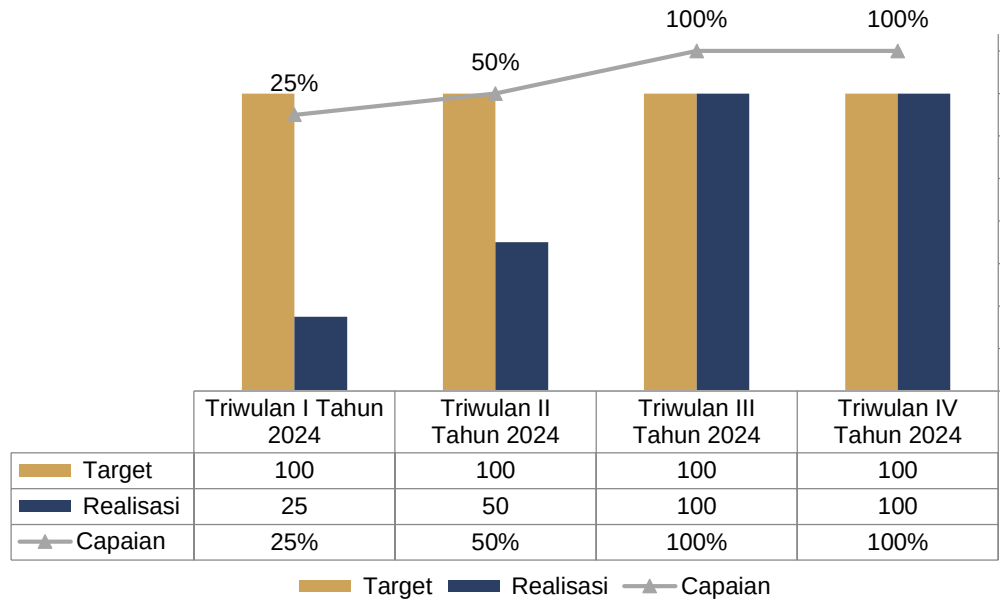
- 1) Alat Penerangan Jalan;
- 2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;
- 3) Marka Jalan;
- 4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 5) Paku Jalan;
- 6) Rambu Lalu Lintas;
- 7) Rambu Tiang Gawang;
- 8) Rambu Tiang F;
- 9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;
- 10) Pagar Pengaman Jalan;

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini



digambarkan pada **Gambar II.12**. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



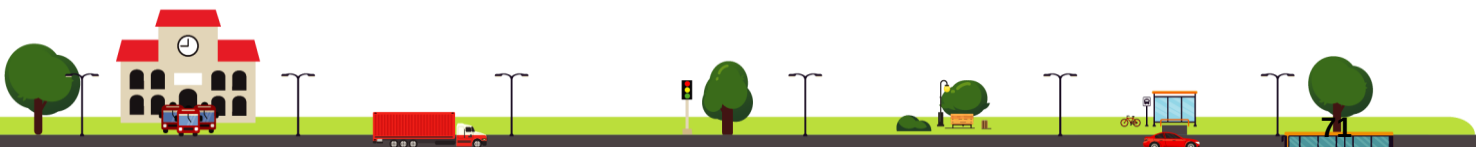
Gambar II.7. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

Tabel II. 30 Target dan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	100	100	100	100
2	Realisasi	25	50	100	100
3	Capaian	25%	50%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I sebesar 25%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 25%.
- Pada triwulan II, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah



terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan II sebesar 50%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 50%.

- Pada triwulan III, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan III sebesar 100%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan IV sebesar 100%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Perlengkapan Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Perlengkapan Jalan yang telah
terpasang kondisi ideal

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\% Realisasi = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan;
4. Barang dikirim tepat waktu;
5. Komunikasi yang efektif;
6. Perencanaan yang matang;
7. Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan;
8. Kualitas dan Kuantitas sesuai.

- **Faktor Kegagalan**

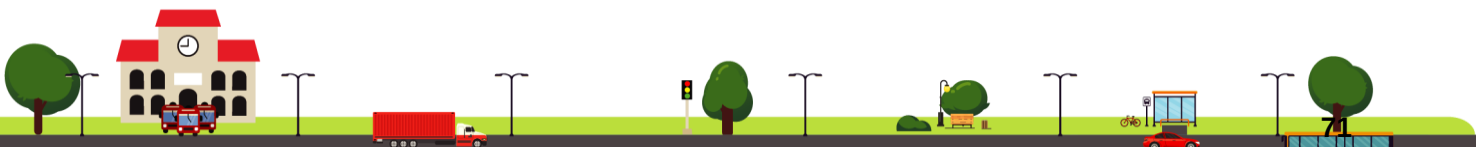
Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk);
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan;
4. Pengiriman barang yang terlambat;
5. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi;
6. Tidak ada nya perencanaan;
7. Pekerjaan tidak sesuai dengan kebutuhan;
8. Kualitas dan Kuantitas tidak sesuai.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal adalah 100%. Dimana hasil capaian berasal dari nilai realisasi dibagi nilai target dikali 100 persen. Artinya capaian kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal mencapai target yang sempurna.

$$\% Capaian = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$



- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 34.323.126.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 28.497.482.108 atau mencapai 83,03% dengan Nomenklatur POK : Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Kode Anggaran (4639.RAC.053.051).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan;
4. Melaksanakan Pemasangan perlengkapan jalan di kondisi ideal yang telah ditentukan;
5. Menghidupkan lingkungan yang nyaman sehingga terlaksananya komunikasi yg efektif untuk pencapaian yang sesuai dengan harapan;
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. Dokumen Angkutan Barang;
- e. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;

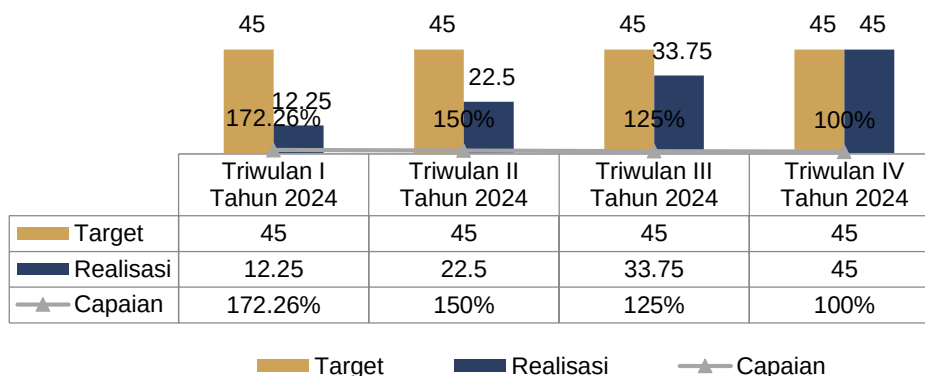


- f. Jenis barang yang diangkut, berat angkutandan asal tujuan.

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dengan jumlah kendaraan yang masuk dalam UPPKB itu sendiri. Adapun jenis pelanggaran yang disebut berupa pada kelengkapan administrasi, pemuatan, berat kendaraan beserta muatan dan dimensi kendaraan. Semakin besar persentase pelanggaran yang ditemukan, maka dinilai buruk. Sebaliknya jika kecil persentase pelanggaran, maka dinilai baik

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 45 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 45 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.14**. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024.



Gambar II.8. Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024.

Tabel II. 34 Target dan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	45	45	45	45
2	Realisasi	12,25	22,5	33,75	45
3	Capaian	172,26%	150%	125%	100%



Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 45%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I sebesar 12,25%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 172,26%.

- Pada triwulan II, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 45%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan II sebesar 22,5%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 150%.

- Pada triwulan III, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 45%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan III sebesar 33,75%.

Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 125%.

- Pada triwulan IV, target persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan sebesar 45%. Realisasi pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan IV sebesar 45%. Sehingga capaian pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 45% yang diperoleh dari



capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK).

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Pelanggaran} \\ &\text{pada UPPKB Direktorat} \\ &\text{Jenderal Perhubungan} \\ &\text{Darat} \end{aligned} = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{(45 - (45 - 45))}{45} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Para sopir dan armada angkutan bersedia dengan sadar diri memasuki wilayah UPPKB;
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Para sopir dan armada angkutan tertib administrasi maupun muatan barang.
4. Persaingan Harga yang tidak sehat antara penyedia jasa angkutan barang sehingga untuk menutupi kerugian dari penyedia jasa angkutan barang akan memuat lebih banyak barang dan mengakibatkan kendaraan Overload, sehingga perlu adanya aturan Tarif minimal angkutan barang;

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain:

1. Para sopir dan armada angkutan susah untuk diarahkan memasuki wilayah UPPKB;
2. Kurangnya kesadaran Para sopir dan armada angkutan untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku ;
3. Para sopir dan armada angkutan tidak tertib dalam administrasi maupun kelebihan muatan barang.



- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(45 - (45 - 45))}{45} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Kinerja**

Adapun anggaran terkait Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.767.792.000,- dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 1.403.940.176 atau mencapai 97,7% dengan Nomenklatur POK : Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola Kode Anggaran (4639.CDP.077.052.B).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan ZoSS, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan serta melakukan monitoring terhadap fasilitas ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan.

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi pemukiman menuju sekolah.



Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan / atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan merupakan pemberian pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan transportasi darat.

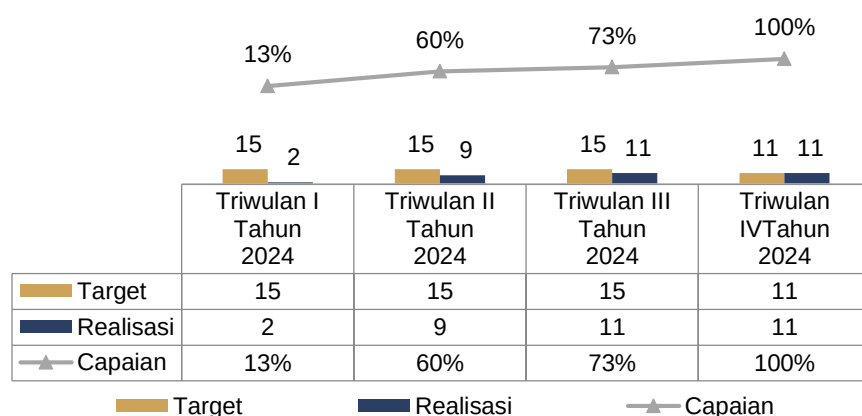
Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

**Jumlah Ketersediaan Fasilitas
Keselamatan ZoSS, RASS, dan
Batas Kecepatan**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 sebesar 11 Lokasi jika dibandingkan dengan target pada Revisi II PK 2024 sebesar 11 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.16**. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan.



Gambar II.9. Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan 2024



Tabel II. 38 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	15	15	15	11
2	Realisasi	2	9	11	11
3	Capaian	13%	60%	73%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan yang ditetapkan sebesar 15 Lokasi. Realisasi Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada triwulan I sebesar 2 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sebesar 13%.
- Pada triwulan II, target Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan yang ditetapkan sebesar 15 Lokasi. Realisasi Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada triwulan II sebesar 9 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sebesar 60%.
- Pada triwulan III, target Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan yang ditetapkan sebesar 15 Lokasi. Realisasi Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada triwulan III sebesar 11 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sebesar 73%.
- Pada triwulan IV, target Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan yang ditetapkan sebesar 11 Lokasi. Realisasi Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan pada triwulan IV sebesar 11 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah



ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Pembangunan Fasilitas keselamatan ZoSS BPTD Kelas II Kalimantan Selatan telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja awal Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 15 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan, namun pada tahun berjalan terdapat Auto Adjustmen (AA) sehingga pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat perubahan target pada Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) 2024 menjadi 11 Lokasi.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 memiliki realisasi 11 lokasi dikarenakan pada tahun berjalan terdapat Auto Adjustmen (AA) sehingga hanya dapat tersedia pada 11 Lokasi ZoSS. Untuk menghitung Indikator Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah ketersediaan Fasilitas} \\ \text{keselamatan ZoSS, RASS, dan batas} \\ \text{kecepatan} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$



- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan antara lain:

1. Kondisi di lapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan;
4. Barang dikirim tepat waktu;
5. Komunikasi yang efektif;
6. Perencanaan yang matang.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk);
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan;
4. Pengiriman barang yang terlambat;
5. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi;
6. Tidak ada nya perencanaan;
7. Adanya Auto Adjustmen (AA).

- **Capaian kinerja**

Persentase capaian Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun anggaran 2024 terealisasi 11 paket dengan capaian sebesar 100%.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Jumlah ketersediaan Fasilitas
keselamatan ZoSS, RASS, dan batas
kecepatan

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$



- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 4.722.465.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 4.722.462.476 atau mencapai 100% dengan Nomenklatur POK : Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Kode Anggaran (4639.CAC.055.052.A)

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan Zona Selamat Sekolah
2. Dapat mencegah peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Dapat mendidik anak sedini mungkin untuk taat hukum, beretika, berempati dalam berlalu lintas di jalan serta peduli terhadap lingkungan.
4. Dapat mendidik masyarakat sekitar sekolah selaku pengguna jalan untuk memberi hak jalan kepada pejalan kaki dan sepeda secara umum, dan bagi murid secara khusus.
5. Dapat memotivasi guru dan orang tua murid untuk menjadi panutan anak dalam berlalu lintas.

IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sasaran peserta dari kegiatan Pekan Keselamatan Jalan yaitu mulai dari anak-anak TK hingga SMA.

Untuk menghitung Indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

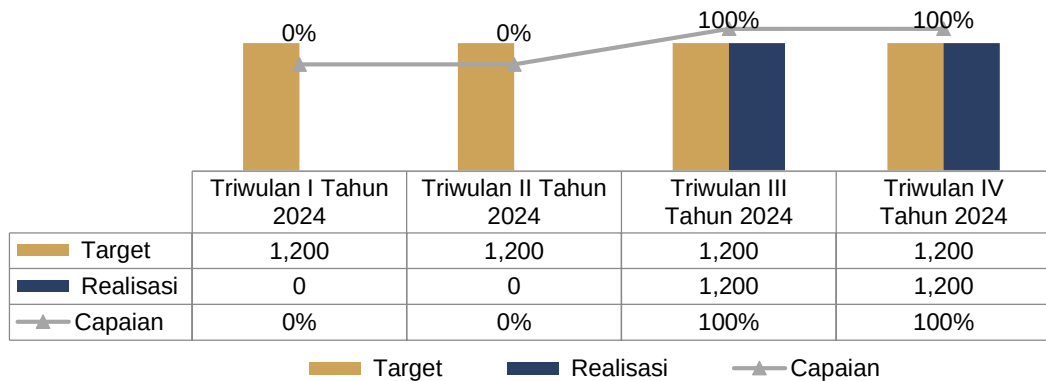


Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 sebesar 1200 orang jika dibandingkan dengan target pada Revisi II PK 2024 sebesar 1200 orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.18**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar II.10. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024

Tabel II. 42 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I Tahun 2024	TW-II Tahun 2024	TW-III Tahun 2024	TW-IV Tahun 2024
1	Target	15	15	15	11
2	Realisasi	2	9	11	11
3	Capaian	13%	60%	73%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa:



- Pada triwulan I, target Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yang ditetapkan sebesar 1200 orang. Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada triwulan I sebesar 0 orang. Sehingga capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 0%.
- Pada triwulan II, target Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yang ditetapkan sebesar 1200 orang. Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada triwulan II sebesar 0 orang. Sehingga capaian Jumlah Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 0%.
- Pada triwulan III, target Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yang ditetapkan sebesar 1200 orang. Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada triwulan III sebesar 1200 orang. Sehingga capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yang ditetapkan sebesar 1200 orang. Realisasi Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan pada triwulan IV sebesar 1200 orang. Sehingga capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.



- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1200 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi} \\ \text{tentang keselamatan transportasi jalan} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1200}{1200} \times 100\% = 100\%$$

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2024 sudah terealisasi sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya himbuan keselamatan dilakukan pada saat acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Indikator keberhasilan dalam Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan adalah tercapainya target sosialisasi keselamatan. Adapun yang menjadi Faktor Keberhasilan dan Kendala selama pelaksanaan, yaitu :

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat dalam Pelaksanaan sosialisasi keselamatan jalan;
2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.
4. Kerjasama yang baik antara BPTD dengan pihak sekolah;
5. Persiapan sosialisasi keselamatan transportasi yang matang serta acara yang menarik.



- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;
2. Tidak tersampainya undangan untuk menghadiri acara;
3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman;
4. Faktor cuaca dan kondisi di lapangan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 adalah 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya capaian kinerja indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan mencapai target yang sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1200}{1200} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan senilai Rp 350.000.000,- dengan realisasi di Triwulan IV Tahun 2024 Rp. 349.239.300,- atau mencapai 99,78% dengan nomenklatur POK : Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Kalsel, Kode Anggaran (4639.PEH.049.051.A)

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan dengan rangkaian kegiatan yang menarik;
2. Menciptakan rasa nyaman bagi para masyarakat yang mengikuti acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan;
3. Mewujudkan bentuk tanggungjawab dan kepedulian insan perhubungan.



IKK 7a Persentase standarisasi pengujian kendaraan bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh Kab/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB adalah sebagai aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

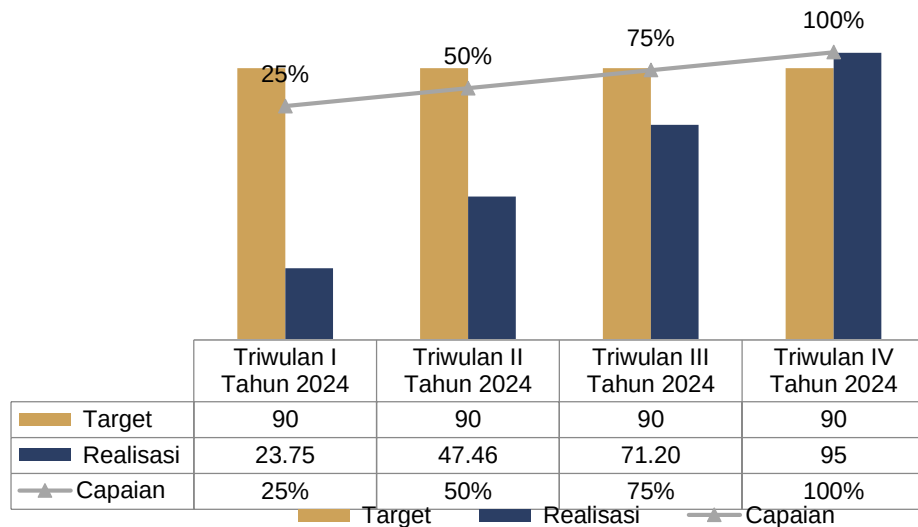
Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar 95% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.20.** Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2024.





Gambar II.11. Grafik Capaian IKK Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024

Tabel II. 46 Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	95	95	95	95
2	Realisasi	23,75	47,46	71,20	95
3	Capaian	25%	50%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi Jumlah Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan I sebesar 23,75%. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 25%.
- Pada triwulan II, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan II sebesar 47,46%. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 50%.



- Pada triwulan III, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan III sebesar 71,20%. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 75%.
- Pada triwulan IV, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 95%. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan IV sebesar 95%. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 95% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Realisasi Kinerja**

Ruang Lingkup Unit Pelaksana Uji Berkala (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kab/Kota di wilayah kerja BPTD Kelas II Kalimantan Selatan yang terdiri 13 (tigabelas) Kab/Kota dengan penetapan standarisasi berupa Akreditasi UPUBKB, yaitu sebagai berikut :



NO	DAERAH UPUBKB	AKREDITASI							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Banjarmasin	-	B bersyarat	B bersyarat	B	B	A	A	A
2	Kota Banjarbaru	-	C	C	C	B	B	B	B
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	-	C	C	C	B	B	B	B
4	Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	B	B	B	B
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	-	C	C	B	B	B	B	B
6	Kabupaten Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Barito Kuala	-	-	-	B Bersyarat	B Bersyarat	B	B	B
8	Kabupaten Tanah Laut	B	B	B	B	B	B	B	B
9	Kabupaten Tanah Bumbu	-	C	B	B	B	B	B	B
10	Kabupaten Tabalong	B	B	B	B	B	A	A	A
11	Kabupaten Kotabaru	-	C	C	C	-	B	B	B
12	Kabupaten Banjar	-	C	C	B	B	B	B	B
13	Kabupaten Balangan	-	C	C	B	B	B	B	B

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

• Faktor Keberhasilan

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota yang ada di Kalsel
2. Ketersediaan Alat uji yang lengkap dan telah terkalibrasi
3. Fasilitas pengujian yang terstandarisasi melalui akreditasi

• Faktor Kegagalan

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung uji
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji



3. ketidak mampuan Dishub Kab/Kota untuk memenuhi Fasilitas dan Alat uji kendaraan bermotor

- **Capaian Kinerja**

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan transportasi jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun tindak lanjut yang dilakukan di Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Namun realisasinya, terdapat 1 Kab/Kota yang masih belum mempunyai gedung uji (Kab. Tapin), sehingga tidak dapat dilakukan uji berkala terhadap pengujian kendaraan bermotor tersebut.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor senilai Rp. 208.230.000,- dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 167.327.853,- atau mencapai 80,36% dengan Nomenklatur POK : Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan, Kode Anggaran (4640.FAE.923.B).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terciptanya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Menjamin peralatan alat ukur/uji yang digunakan harus sesuai spesifikasi yang di persyaratkan.
3. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai standar dan SOP yang telah ditentukan.
4. Terus meningkatkan kualitas SDM terkait pengujian kendaraan bermotor melalui Bimtek dan pelatihan – pelatihan.
5. Membantu Dishub Kab/ Kota untuk memenuhi Peralatan uji kendaraan bermotor



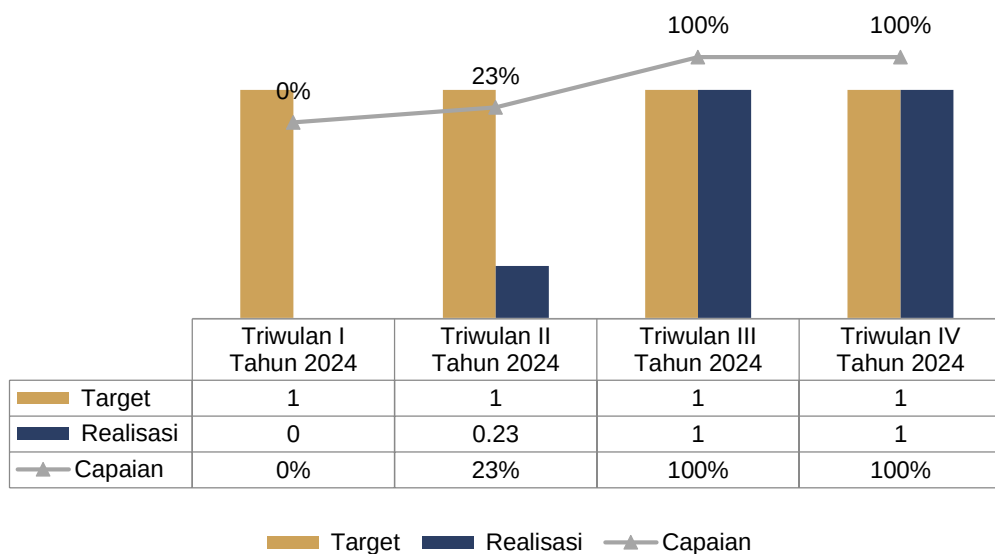
IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2024 sebesar 1 Lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar 1 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.22**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024.



Gambar II.12. Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024

Tabel III. 50 Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	1	1	1	1
2	Realisasi	0	0,23	1	1
3	Capaian	0%	23%	100%	100%



Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang ditetapkan sebesar 1 Lokasi. Realisasi Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada triwulan I sebesar 0 Lokasi. Sehingga capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 0%.
- Pada triwulan II, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 1 Lokasi. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan II sebesar 0.23. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 23%.
- Pada triwulan III, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 1 Lokasi. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan III sebesar 1 Lokasi. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 100%.
- Pada triwulan IV, target Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebesar 1 Lokasi. Realisasi Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada triwulan IV sebesar 1 Lokasi. Sehingga capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, maka telah ditetapkan sebagai dasar pemasangan rambu sungai.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1 Lokasi



yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah Ketersediaan fasilitas} \\ \text{keselamatan alur pelayaran SDP} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2024 antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan transportasi di SDP. Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP untuk di tahun 2024 sudah dilaksanakan 100% dengan pemasangan rambu sungai sebanyak 200 unit pada DAS Barito. Adapun yang menjadi Faktor Keberhasilan dan Kendala selama pelaksanaan, yaitu :

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan
4. Lokasi pekerjaan tidak terlalu jauh
5. Tidak adanya gangguan dari pihak eksternal
6. Pemenuhan pekerjaan sesuai dengan target rencana

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (Cuaca buruk)



2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan
4. Akses jalur sungai banyak terdapat jembatan kecil
5. Surutnya air sungai sehingga tidak bisa melaksanakan pemasangan rambu

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2024 adalah 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tahun 2024 memenuhi target yang ditentukan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2024 yaitu senilai Rp. 2.626.573.000 dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 2.626.354.663 atau mencapai 99,99% dengan Nomenklatur POK : Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau, Kode Anggaran (4639.CAC.065.051.A).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja , Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.



Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Program 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2024 BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	
	I	SAKIP	15	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	



		Nilai 2 (dua) apabila selesai <30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	1	
		Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	10	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B	Indeks Profesionalisme ASN		25	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	
	2	Kompetensi	10	
	3	Kinerja	8	
	4	Disiplin	1	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		25	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		



		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3		Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25%	
	1	Penyusunan NSPK	7	
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%		
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6	
		Nilai 6 (enam) apabilasebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabilasebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabilakurang dari 70%		
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6	
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%		
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6	
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%		

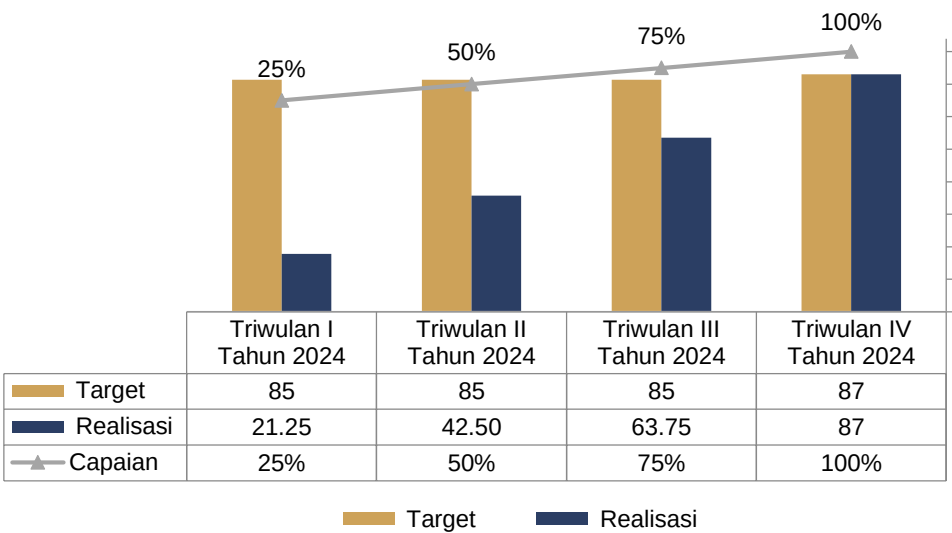
**Kualitas penyelenggaraan
dukungan teknis transportasi
darat**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 sebesar senilai 87. Jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 sebesar senilai 87 maka capaian kinerja mencapai 100% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II. 24.** Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.





Gambar II. 13 Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024

Tabel II. 54 Target dan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	85	85	85	87
2	Realisasi	21,25	42,50	63,75	87
3	Capaian	25%	50%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang ditetapkan senilai 85. Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan I senilai 21,25. Sehingga capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Jalan sebesar 25%.
- Pada triwulan II, target Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang ditetapkan senilai 85. Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan II senilai 42,50. Sehingga capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 50%.
- Pada triwulan III, target Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang ditetapkan senilai 85. Realisasi Kualitas



Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan III senilai 85. Sehingga capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 100%.

- Pada triwulan IV, target Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang ditetapkan senilai 87 dikarenakan ada kenaikan realisasi maka target disesuaikan kembali pada Revisi II PK 2024. Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada triwulan IV senilai 87. Sehingga capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terhadap Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target senilai 85 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Namun pada tahun berjalan terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024 yang semula target senilai 85 berubah menjadi senilai 87 berdasarkan hasil realisasi yang meningkat.

- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar :

$$\text{Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{25+25+12+25}{100} \times 100\% \\ &= \frac{87}{100} \times 100\% \\ &= 87\%\end{aligned}$$



NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25	25
	I	SAKIP	15	15
	a	Rencana Strategis (Renstra)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai <30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	1	1
		Nilai 1 (satu) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 0,5 (nol koma lima) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 30 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 30-60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >60 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UKE II Teknis atau selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	10	10
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan		
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif		
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif		
B	Indeks Profesionalisme ASN		25	25
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6	6
	2	Kompetensi	10	10
	3	Kinerja	8	8
	4	Disiplin	1	1
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		25	12
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	6



		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	6
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5	0
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas		25	25
	1	Penyusunan NSPK	7	7
		Nilai 7 (tujuh) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 5 (lima) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 3 (tiga) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 1 (satu) apabila NSPK diusulkan UKE II Teknis ke Bagian Hukum dan Humas kurang dari 40%		
	2	Pengelolaan Informasi Publik	6	6
		Nilai 6 (enam) apabilasebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabilasebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila kurang dari 70%		
	3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila perjanjian dan kerjasama dapat disepakati/laksanakan kurang dari 70%		
	4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6	6
		Nilai 6 (enam) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 90,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 4 (empat) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan sebesar 70,1% sampai dengan 90%		
		Nilai 2 (dua) apabila permasalahan hukum atau kasus diselesaikan kurang dari 70%		

- Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
2. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan



3. Adanya penambahan ASN yang kompeten

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja yang tidak sesuai target;
3. Kurangnya SDM yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.

- **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat adalah 87%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2023 belum mencapai target dengan sempurna.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{25+25+12+25}{100} \times 100\% \\ &= \frac{87}{87} \times 100\% = \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 yaitu senilai Rp 3.813.450.000,- dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 3.563.468.027,- atau mencapai 93,44%. Dengan Nomenklatur POK : Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan, Kode Anggaran (4640.FAE.923).

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dimasa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Anggaran.
2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan;



3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.
5. Peningkatan SDM yang kompeten.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Program 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan BPTD Kelas II Kalsel dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan BPTD Kelas II Kalsel.

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
2. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

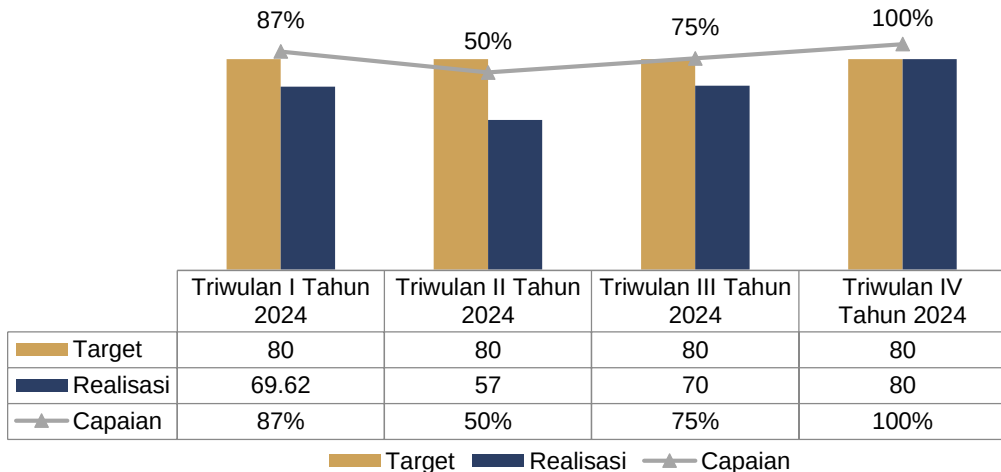
**Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran
Ditjen Perhubungan Darat**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 senilai 80. Jika dibandingkan dengan target Revisi II PK 2024 senilai 80 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.26**. Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar II.14. Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024

Tabel II. 58 Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 pada BPTD Kelas II Kalsel Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Rincian	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
		Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Target	80	80	80	80
2	Realisasi	69,62	57	70	80
3	Capaian	87%	50%	75%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Pada triwulan I, target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan senilai 80. Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I senilai 69,62. Sehingga capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 87%.



- Pada triwulan II, target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan senilai 80. Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan II senilai 57 dikatakan menurun dikarenakan hasil survey yang juga menurun terkait tingkat kepuasan pegawai terhadap fasilitas perkantoran. Sehingga capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat turun menjadi 50%.
- Pada triwulan III, target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan senilai 80. Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan III senilai 70. Sehingga capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 75%.
- Pada triwulan IV, target Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang ditetapkan senilai 80. Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan IV senilai 80. Sehingga capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024 Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target senilai 80 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2024.



- **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	12,67%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	5,43
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	7,24
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	16,75%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	40,02%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	19,7
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	5,5
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	15

**Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran
Ditjen Perhubungan Darat**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{12,67\% + 16,75\% + 40,2\%}{80} \times 100\% \\ &= \frac{70\%}{80} \times 100\% = \mathbf{87,5\%} \end{aligned}$$

Note : Untuk Cara perhitungan melalui Hasil survey Kuisioner terlampir pada halaman lampiran pendukung

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2024 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan.



- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 mencapai 100%. Dimana hasil persentase capaian kinerja berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 memenuhi target yang sempurna.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu senilai Rp 150.000.000,- dengan realisasi di Tahun 2024 Rp. 150.000.000,- atau mencapai 100%. Dengan nomenklatur POK : Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit , Kode Anggaran (4596.EBB.906.005.A).



a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

III. 2. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 138.192.830.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 62 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	100.223.677.000	95,60%
PNBP	Rp.	4.605.648.000	0,04%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	104.829.325.000	100,00%

Tabel III. 63 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	4.384.645.000	0,41%
Belanja Barang	Rp.	69.021.066.000	0,65%
Belanja Modal	Rp.	31.423.614.000	0,29%
Total	Rp.	104.829.325.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2024 akibat adanya Revisi DIPA di BPTD Kelas II Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.000.915.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Triwulan IV TA. 2024 adalah sebesar **Rp. 105.830.240.000 ,-** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III. 64. Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2024

RM	Rp.	101,643,419,000	96,04%
PNBP	Rp.	4,186,821,000	39,56%
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	105,830,240,000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel



Tabel III. 65 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp.	8,199,829,000	7,74%
Belanja Barang	Rp.	67,780,677,000	64,04%
Belanja Modal	Rp.	29,849,734,000	2820%
Total	Rp.	105,830,240,000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- Surat Kementerian Keuangan tanggal 24 November 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (DIPA awal);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Januari 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 1);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 6 Februari 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 2);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 16 Februari 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 3);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 28 Februari 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 4);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 26 Maret 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 5);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 23 April 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 6);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 6 Mei 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan



Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 7);

- i) Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Mei 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 8);
- j) Surat Kementerian Keuangan tanggal 21 Juni 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 9);
- k) Surat Kementerian Keuangan tanggal 09 Juli 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 10);
- l) Surat Kementerian Keuangan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 11);
- m) Surat Kementerian Keuangan tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 12);
- n) Surat Kementerian Keuangan tanggal 26 September 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 13);
- o) Surat Kementerian Keuangan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 14);
- p) Surat Kementerian Keuangan tanggal 7 November 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 15);
- q) Surat Kementerian Keuangan tanggal 14 November 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 16);



- r) Surat Kementerian Keuangan tanggal 3 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 17);
- s) Surat Kementerian Keuangan tanggal 18 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 18);
- t) Surat Kementerian Keuangan tanggal 23 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 19);
- u) Surat Kementerian Keuangan tanggal 27 Desember 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan TA. 2024 (Revisi 20);

III.3.1.2. Revisi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kali revisi DIPA ,maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III. 66 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-1	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-2	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-3	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-4	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-5	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-6	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-7	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-8	100.223.677.000	4.605.648.000	-	104.829.325.000
REVISI KE-9	102.737.306.000	4.605.648.000	-	107.342.954.000



REVISI KE-10	102.737.306.000	4.605.648.000	-	107.342.954.000
REVISI KE-11	102.302.419.000	4.186.821.000	-	106.489.240.000
REVISI KE-12	102.302.419.000	4.186.821.000	-	106.489.240.000
REVISI KE-13	102.302.419.000	4.186.821.000	-	106.489.240.000
REVISI KE-14	102.302.419.000	4,186,821,000	-	106.489.240.000
REVISI KE-15	101.793.419.000	4,186,821,000	-	105.980.240.000
REVISI KE-16	101.793.419.000	4,186,821,000	-	105.980.240.000
REVISI KE-17	101.793.419.000	4,186,821,000	-	105.980.240.000
REVISI KE-18	101,643,419,000	4,186,821,000	-	105.830.240.000
REVISI KE-19	101,643,419,000	4,186,821,000	-	105.830.240.000
REVISI KE-20	101,643,419,000	4,186,821,000	-	105.830.240.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

Tabel III. 67 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-1	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-2	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-3	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-4	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-5	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-6	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-7	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-8	4.384.645.000	69.021.066.000	31.423.614.000	104.829.325.000
REVISI KE-9	7.055.851.000	68.289.677.000	29.849.734.000	107.342.954.000
REVISI KE-10	7.055.851.000	68.289.677.000	29.849.734.000	107.342.954.000
REVISI KE-11	8.349.829.000	68.289.677.000	29.849.734.000	106.489.240.000
REVISI KE-12	8.349.829.000	68.289.677.000	29.849.734.000	106.489.240.000
REVISI KE-13	8.349.829.000	68.289.677.000	29.849.734.000	106.489.240.000
REVISI KE-14	8.349.829.000	68.289.677.000	29,849,734,000	106.489.240.000
REVISI KE-15	8.349.829.000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.980.240.000
REVISI KE-16	8.349.829.000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.980.240.000
REVISI KE-17	8.349.829.000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.980.240.000



REVISI KE-18	8,199,829,000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.830.240.000
REVISI KE-19	8,199,829,000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.830.240.000
REVISI KE-20	8,199,829,000	67,780,677,000	29,849,734,000	105.830.240.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel



Tabel III. 68. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2024

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
			PER TRIWULAN I		PER TRIWULAN II		PER TRIWULAN III		PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	4.384.645.000	-	4.384.645.000	-	4.384.645.000	3.965.184.000	8.349.829.000	150.000.000	8,199,829,000
Belanja Barang	69.021.066.000	-	69.021.066.000	-	69.021.066.000	731.389.000	68.289.677.000	491.000.000	67,780,677,000
· RM	68.921.066.000	-	68.921.066.000	-	68.921.066.000	731.389.000	68.189.677.000	509.000.000	67.680.677
· PNBPNBP	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000
Belanja Modal	31.423.614.000	-	31.423.614.000	-	31.423.614.000	1.573.880.000	29.849.734.000	-	29,849,734,000
· RM	26.917.966.000	-	26.917.966.000	-	26.917.966.000	1.155.053.000	25.762.913.000	-	25.762.913.000
· PNBPNBP	4.505.648.000	-	4.505.648.000	-	4.505.648.000	418.821.000	4.086.821.000	-	4.086.821.000
· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	104.829.325.000	-	104.829.325.000	-	104.829.325.000	1.659.915.000	106.489.240.000		105.830.240.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):



Tabel III. 69 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas II Kalsel	104.829.325.000	104.829.325.000	9.611.615.674	9,17	104.829.325.000	43.722.009.608	41,71	106.489.240.000	68.036.637.902	63,89	105.830.240.000	98.819.944.802	93,38
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	93.721.285.000	93.721.285.000	6.527.325.667	6,96	93.721.285.000	36.831.392.447	39,3	91.416.016.000	58.841.983.740	64,36	169.457.752.800	84.207.980.103	49,69
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	21.509.595.000	21.509.595.000	343.279.239	1,6	21.509.595.000	3.026.402.937	14,07	20.778.208.000	11.000.270.197	52,94	98.819.944.800	20.067.421.313	99
4638	Pelayanan Transportasi Darat	3.918.509.000	3.918.509.000	741.835.720	18,95	3.918.509.000	1.808.896.511	46,16	3.918.507.000	2.907.447.110	74,19	3.918.507.000	3.890.844.524	99,29
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	50.660.331.000	50.660.331.000	5.122.820.238	10,11	50.660.331.000	30.011.805.075	59,24	50.083.929.000	40.638.971.184	81,14	50.083.929.000	43.651.629.892	87,16
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	17.632.850.000	17.632.850.000	319.390.470	1,81	17.632.850.000	1.984.287.924	11,25	16.635.372.000	4.295.295.249	25,82	16.635.372.000	16.598.084.374	99,78
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.108.040.000	11.108.040.000	3.084.290.007	27,77	11.108.040.000	6.890.617.161	62,03	15.073.224.000	10.638.434.108	70,57	14.773.224.000	14.462.634.846	97,89
4596	Pengelolaan Sistem Informasi Dan Teknologi Transportasi Darat	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000,00	150.000,00	100
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.573.395.000	6.573.395.000	1.491.545.572	22,69	6.573.395.000	2.869.852.011	43,66	6.573.395.000	4.058.139.920	61,73	6.573.395.000	6.432.369.352	97,85
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	4.384.645.000	4.384.645.000	1.592.744.435	36,33	4.384.645.000	4.020.765.150	91,7	8.349.829.000	6.580.294.188	78,80	8.199.829.000	8.030.265.494	97,983

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas II Kalsel

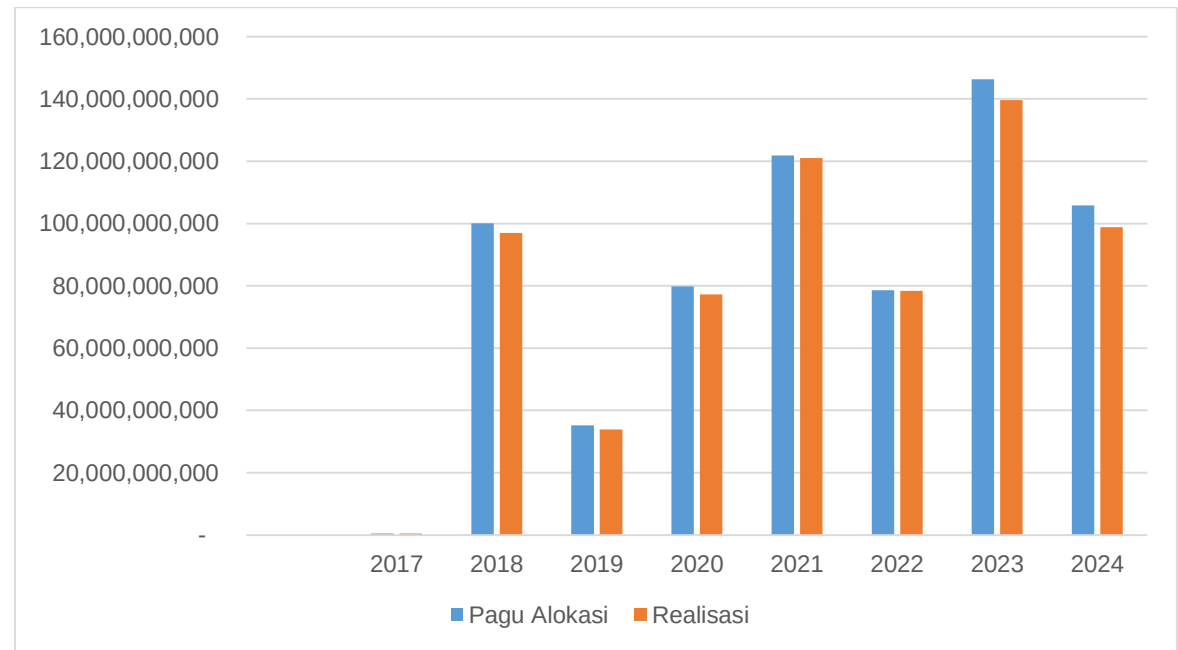


III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 70 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2017	513,547,000	513,547,000	505,191,059	98,37
2	2018	82,524,129,000	100,031,081,000	96,969,244,306	96,68
3	2019	35,264,341,000	35,264,341,000	33,915,619,403	96,18
4	2020	55,554,837,000	79,811,927,000	77,211,002,220	96,74
5	2021	148,262,010,000	121,837,135,000	121.064.932.049	99,37
6	2022	100.083.085.000	78.614.942.000	78.332.449.923	99,64
7	2023	138.192.830.000	146.320.980.000	139.627.744.060	95,43
8	2024	104.829.325.000	105.830.240.000	98,819,944,802	93,38



Gambar III. 71 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 - Tahun 2024



Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun **2017** anggaran yang terserap sebesar Rp. 505.191.059,- atau mencapai 98,37% dari pagu akhir Rp. 513.547.000,-. pada tahun **2018** anggaran yang terserap sebesar Rp. 96.969.244.306,- atau mencapai 96,68% dari pagu akhir Rp. 100.031.081.000,-. pada tahun **2019** anggaran yang terserap sebesar Rp. 33.915.619.403,- atau mencapai 96,18% dari pagu akhir Rp. 35.264.341.000,-. pada tahun **2020** anggaran yang terserap sebesar Rp. 77.211.002.220,- atau mencapai 96,74% dari pagu akhir Rp. 79.811.927.000,-. pada tahun **2021** daya serap sebesar Rp. 121.064.932.049,- atau mencapai 99,37% dari pagu akhir Rp. 121,837,135,000,-. Pada tahun **2022** serapan anggaran sebesar Rp. 78.332.449.923,- atau mencapai 99,64% dari pagu akhir Rp. 78.614.942.000 ,-. Dan pada tahun **2023** serapan anggaran sebesar Rp. 139.627.744.060,- atau mencapai 95,43% dari pagu akhir Rp. 146.320.980.000,-. Serta pada tahun **2024** serapan anggaran sebesar Rp. 98,819,944,802,- atau mencapai 93,38% dari pagu akhir Rp. 105.830.240.000,-.



III.3.2. Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 72. Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas II Kalsel	104.829.325.000	104.829.325.000	9.611.615.674	9,17	104.829.325.000	43.722.009.608	41,71	106.489.240.000	68.036.637.902	63,89	105.830.240.000	98.819.944.802	93,38
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	93.721.285.000	93.721.285.000	6.527.325.667	6,96	93.721.285.000	36.831.392.447	39,3	91.416.016.000	58.841.983.740	64,36	169.457.752.800	84.207.980.103	49,69
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	21.509.595.000	21.509.595.000	343.279.239	1,6	21.509.595.000	3.026.402.937	14,07	20.778.208.000	11.000.270.197	52,94	98.819.944.800	20.067.421.313	99
4638	Pelayanan Transportasi Darat	3.918.509.000	3.918.509.000	741.835.720	18,95	3.918.509.000	1.808.896.511	46,16	3.918.507.000	2.907.447.110	74,19	3.918.507.000	3.890.844.524	99,29
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	50.660.331.000	50.660.331.000	5.122.820.238	10,11	50.660.331.000	30.011.805.075	59,24	50.083.929.000	40.638.971.184	81,14	50.083.929.000	4398.819.944.802,651.629.892	87,16
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	17.632.850.000	17.632.850.000	319.390.470	1,81	17.632.850.000	1.984.287.924	11,25	16.635.372.000	4.295.295.249	25,82	16.635.372.000	16.598.084.374	99,78
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.108.040.000	11.108.040.000	3.084.290.007	27,77	11.108.040.000	6.890.617.161	62,03	15.073.224.000	10.638.434.108	70,57	14.773.224.000	14.462.634.846	97,89
4596	Pengelolaan Sistem Informasi Dan Teknologi Transportasi Darat	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	150.000,00	150.000,00	100
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.573.395.000	6.573.395.000	1.491.545.572	22,69	6.573.395.000	2.869.852.011	43,66	6.573.395.000	4.058.139.920	61,73	6.573.395.000	6.432.369.352	97,85
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	4.384.645.000	4.384.645.000	1.592.744.435	36,33	4.384.645.000	4.020.765.150	91,7	8.349.829.000	6.580.294.188	78,80	8.199.829.000	8.030.265.494	97,983

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 98,819,944,802,-** atau mencapai 93,38% dari pagu akhir **Rp. 105.830.240.000,-**.



III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.73. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	4.384.645.000	1.592.744.435	36,33	4.384.645.000	4.020.765.150	91,70	8.349.829.000	6.580.294.188	78,80	8,199,829,000	8,030,265,494	97,93
2	Belanja Barang	69.021.066.000	8.018.871.239	11,62	69.021.066.000	32.533.940.059	47,14	68.289.677.000	46.402.326.834	67,90	67,780,677,000	61,931,339,315	91,37
3	Belanja Modal	31.423.614.000	-	0	31.423.614.000	7.167.304.399	22,81	29.849.734.000	16.677.359.954	55,87	29,849,734,000	28,858,339,993	96,98
TOTAL		104.829.325.000	9.611.615.674	9,17	104.829.325.000	43.722.009.608	41,71	106.489.240.000	68.036.637.902	63,89	105.830.240.000	98,819,944,802	93,38

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 9,17% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 41,71% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 63,89 serta pada Triwulan IV yaitu mencapai 93,38%.

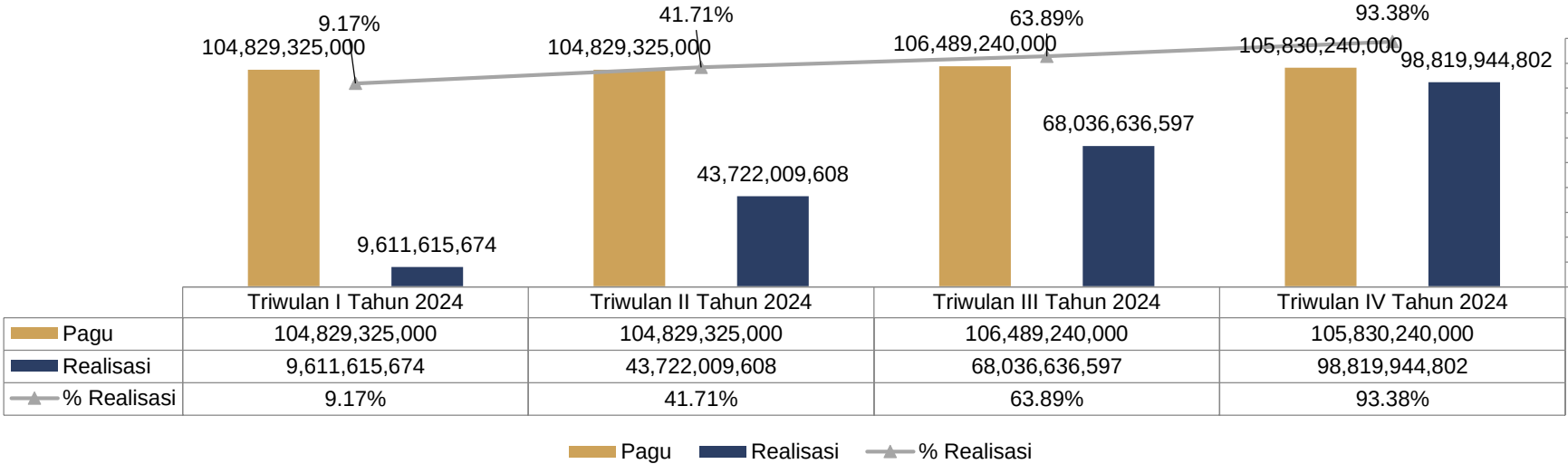


III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.74. Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
		ALOKASI	TW I		ALOKASI	TW II		ALOKASI	TW III		ALOKASI	TW IV	
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	100.223.677.000	9.611.615.674	9,59	100.223.677.000	42.834.151.039	42,74	102.302.419.000	63.909.699.574	62,47	101.643.419.000	94.693.007.779	93,16
2	PNBP	4.605.648.000	-	0	4.605.648.000	887.858.569	19,28	4.186.821.000	4.126.937.023	98,57	4.186.821.000	4.126.937.023	98,57
3	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		104,829,325,000	9,611,615,674	9,17	104,829,325,000	43,722,009,608	41,71	106,489,240,000	68,036,636,597	63,89	105,830,240,000	98,819,944,802	93,38



Gambar III.15. Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Tahun



Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 9,17% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 41,71% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 63,89% kemudian mengalami peningkatan kembali pada Triwulan IV yaitu mencapai sebesar 93,38%.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.75. Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	8,199,829,000	8,030,265,494	169,563,506
2	Belanja Barang	67,780,677,000	61,931,339,315	5,849,337,685
3	Belanja Modal	29,849,734,000	28,858,339,993	991,394,007
TOTAL		105,830,240,000	98,819,944,802	7,010,295,198

Tabel III.76. Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	101,643,419,000	94,693,007,779	6,950,411,221
2	PNBP	4,186,821,000	4,126,937,023	59,883,977
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		105,830,240,000	98,819,944,802	7,010,295,198



III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I – IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.78. Efisiensi anggaran

No	Sasaran Progam	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda Transportasi	62,5	12,58	49,92	75,78	41,23	34,58	88,53	59,75	28,78	100	92,5	7,5
2	SK2 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat	25	21,22	3,78	95,13	49,37	45,76	95,13	39,64	55,49	100	93,03	6,97
3	SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	37,04	5,2	31,84	53,91	34,34	19,57	101	84,18	16,82	100	93,47	6,53
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi darat	104,7	8,38	96,32	102,35	52,03	50,47	102,35	81,65	20,7	100	93,44	6,56
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	71,25	0	71,25	71,25	0	71,25	75	0	75	100	100	0
Rata-Rata		64,57%	9,47%	55,1%	79,68%	35,39%	44,29%	92,40%	53,04%	39,36%	100%	94,48%	5,51%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 94,48% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,51%.



III.3.4. Efisiensi Attas Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II.79. Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	267	187	70,03%	144	144	100%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa capaian SDM sebesar 70,03% dengan realisasi sebanyak 187 SDM dari jumlah kebutuhan sebesar 267, dimana realisasi tersebut terdiri dari 83 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rata-rata Target Kinerja sebesar 144 dan Realisasi Kinerja sebesar 144% menunjukkan Capaian Kinerja sebesar 100%.



III.3.5. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan.
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yg menjadikan kendala dalam pelaksanaannya;
4. Proses pengumpulan kinerja dari masing-masing seksi masih sering terlambat, karena kurangnya koordinasi;
5. Seksi kurang peduli terhadap capaian kinerja di unit kerjanya, akibatnya laporan pelaksanaan capaian kinerja maupun hambatan dalam pelaksanaan;
6. capaian kinerja tidak tersampaikan pada tim sakin sehingga tim sakin mengalami kesulitan dalam menganalisis keberhasilan capaian.



BAB III PENUTUP

III. Penutup

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 14 (empatbelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Triwulan IV tahun 2024, terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100% ;
2. Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terealisasi sebesar 90% (target 90%) tercapai 100%;
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
7. Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
8. Jumlah Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 45% (target 45%) tercapai 100%;
9. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan terealisasi sebesar 11 Lokasi (target 11 lokasi) tercapai 100%
10. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1200 orang (target 1200) tercapai 100%;
11. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 95% (target 95%) tercapai 100%;

12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 Lokasi) tercapai 100%;
13. Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 87 (target senilai 87) tercapai 100%;
14. Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 80 (target senilai 80) tercapai 100%;

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan ;

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

II.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoa transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Telah Selesai Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK 1.3	Jumlah Terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.	Seksi Prasarana
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Telah Selesai Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	8	8	8	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;	Seksi Prasarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
											2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan.	
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A	%	90	90	90	100%	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3	SK4	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	50	50	100%	TERCAPAI	akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB demi menertibkan / menurunkan angka pelanggaran yang terjadi	Seksi Prasarana
			IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	11	11	11	100%	TERCAPAI	Pembangunan ZoSS telah selesai di 11 Lokasi	Seksi Lalin
			IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000	1000	1000	100%	TERCAPAI	Kegiatan Keselamatan telah terlaksana diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
			IKP 7a	Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	90	100%	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	100%	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai dipasang sejumlah 200 unit.	Seksi Lalin
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	85	85	87	102,4%	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas	- Subbag Tata Usaha - Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	80	80	80	100%	TERCAPAI	Telah dilakukan Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran	Subbag Tata Usaha



Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	50
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	%	15
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	82

Banjar, 4 Desember 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan



ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Ahmad Yani KM. 17
(Komp. Terminal Gambut Barakat)
Kab. Banjar, 70652

TELP : (0511) 6746526

FAX : (0511) 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

Nomor : PR.202/1/1/BPTD-KALSEL/2024

Banjar, 5 Januari 2024

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Pengesahan Dokumen PK BPTD Kelas II Kalsel

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini mengusulkan permohonan pengesahan PK Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagaimana *terlampir*.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pertimbangan lebih lanjut Bapak Dirjen Hubdat, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan



Zulmardi, ATD, M.M.
NIP.19680317199103 1 002

Tembusan Yth :

Kabag Perencanaan Setditjen Hubdat



PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	lin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	04 / 01 / 2024	
2.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	04 / 01 / 2024	
3.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	04 / 01 / 2024	
4.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	05 / 01 / 2024	
5.	Disetujui	Dony Prasetyo, S.ST.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	05 / 01 / 2024	
6.	Disetujui	Rudu Sutrisno, ATD	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	05 / 01 / 2024	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulmardi, A.TD., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Banjar, 9 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

ZULMARDI, A.TD., M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. | 21.509.595.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. | 3.918.509.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. | 50.660.331.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. | 17.632.850.000 |
| 5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. | 150.000.000 |
| 6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. | 6.573.395.000 |
| 7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp. | 4.384.645.000 |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Banjar, 9 Januari 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan


ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan bermulanya kembali Tahun Anggaran baru 2024 maka dilakukan penyusunan anggaran berdasarkan DIPA NOMOR : SP DIPA- 022.03.2.403855/2024 tanggal 24 November 2023.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.104.829.325.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rezki Satriya Suherman, S.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Zulmardi, A.TD, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

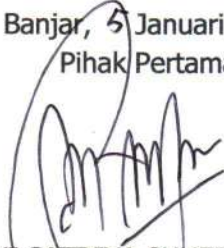
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Banjar, 5 Januari 2024
Pihak Pertama


REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 198510 14 200804 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Banjar, 5 Januari 2024

Pihak Kedua


ZULMARDI, A.TD, M.M
NIP. 19680317 199103 1 002

Pihak Pertama


REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 19851014 200804 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dony Prasetyo, S.ST.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Zulmardi, A.TD., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 5 Januari 2024

Pihak Pertama

DONY PRASETIO, S.ST.

NIP. 19890302 201402 1 004

Pihak Kedua



ZULMARDI, A.TD., M.M.

NIP. 19680317 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Pihak Kedua


ZULMARDI, ATD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Banjar, 5 Januari 2024
Pihak Pertama


DONY PRASETIO, S.ST.
NIP. 19890302 201402 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Marvian Dwi Surya Putra, S.SiT., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Zulmardi, A.TD, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 5 Januari 2024

Pihak Pertama

Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
NIP. 19850322 200912 1 003

Pihak Kedua

ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN PENGAWASAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Pihak Kedua


ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Banjar, 5 Januari 2024

Pihak Pertama


Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
NIP. 19850322 200912 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rudu Sutrisno, A.TD

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Zulmardi, A.TD, M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Banjar, 5 Januari 2024
Pihak Pertama

RUDU SUTRISNO, A.TD
NIP. 19711229 199301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, dan PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Banjari, 5 Januari 2024



Pihak Kedua

ZULMARDI, A.TD, M.M.
NIP. 19680317 199103 1 002

Pihak Pertama

RUDU SUTRISNO, A.TD
NIP. 19711229 199301 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Ahmad Yani KM. 17
(Komp. Terminal Gambut Barakat)
Kab. Banjar, 70652

TELP : (0511) 6746526

FAX : (0511) 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

Nomor : PR.002/1/5/BPTD-KALSEL/2024

Banjar, 08 Juli 2024

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Permohonan Pengesahan Dokumen Revisi I PK BPTD Kelas II Kalsel

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Sehubungan dengan adanya pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan pergantian Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, bersama ini mengusulkan permohonan pengesahan Revisi I PK Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagaimana *terlampir*.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pertimbangan lebih lanjut Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

Si Minto
NIP.19680130 199003 1 001

Tembusan Yth :

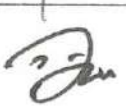
Kabag Perencanaan Setditjen Hubdat



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Iin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan	5/6 - 2024	
2.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	5/6 - 2024	
3.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha	5/6 - 2024	
4.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	5/6 - 2024	
5.	Disetujui	Dony Prasetyo, S.ST.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	5/6 - 2024	
6.	Disetujui	Dwi Hary Yulisetianto, S.SiT., M. Sc.	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	5/6 - 2024	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Banjar, Juli 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 21.509.595.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.918.509.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 50.660.331.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 17.632.850.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 150.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.573.395.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 4.384.645.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Banjar, Juli 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan



SIGIT MINTARSO
NRP. 19680130-199003 1 001

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rev 8 Dengan bermulanya kembali Tahun Anggaran baru 2024 maka dilakukan penyusunan anggaran berdasarkan DIPA NOMOR : SP DIPA- 022.03.2.403855/2024 tanggal 24 November 2023.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.104.829.325.000,-



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rezki Satriya Suherman, S.E.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjär, 10 Juni 2024
Pihak Pertama



REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 198510 14 200804 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Banjar, 10 Juni 2024

Pihak Kedua



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama



REZKI SATRIYA SUHERMAN, S.E.
NIP. 19851014 200804 1 002



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Marvian Dwi Surya Putra, S.SiT., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Banjar, 10 Juni 2024

Pihak Pertama

Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
NIP. 19850322 200912 1 003

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN PENGAWASAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

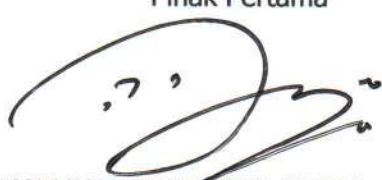
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	1
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Pihak Kedua



SITI MINTARSO
NIP. 19880130 199003 1 001

Banjar, 10 Juni 2024
Pihak Pertama



Ir. MARVIAN DWI SURYA PUTRA, S.SiT., M.M.
NIP. 19850322 200912 1 003



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dony Prasetio, S.ST.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Banjar, 10 Juni 2024

Pihak Pertama

DONY PRASETIO, S.ST.
NIP. 19890302 201402 1 004

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANANAU, DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
2	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
3	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Pihak Kedua


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Banjar, 10 Juni 2024
Pihak Pertama


DONY PRASETIO, S.ST.
NIP. 19890302 201402 1 004



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Hary Yulisetianto, S.SiT., M. Sc.

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjar, 10 Juni 2024

Pihak Pertama

DWI HARY YULISETIANTO, S.SiT., M. Sc.
NIP. 19820720 200312 1 003

Pihak Kedua

SIGIT MINTARSO
NIP. 196807130 199003 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU, dan PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85

Banjar, 10 Juni 2024

Pihak Kedua



SIGEMINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Pihak Pertama



DWI HARY YULISETIANTO, S.SiT., M. Sc.
NIP. 19820720 200312 1 003



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. Ahmad Yani KM. 17
(Komp. Terminal Gambut Barakat)
Kab. Banjar, 70652

TELP : (0511) 6746526

FAX : (0511) 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

Nomor : PR.202/1/8/BPTD-KALSEL/2024

Banjar, Desember 2024

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Pengesahan Dokumen Revisi II PK BPTD Kelas II Kalsel

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bersama ini mengusulkan permohonan pengesahan Revisi II PK Kepala BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2024, sebagaimana *terlampir*.

Demikian disampaikan atas perhatian dan pertimbangan lebih lanjut Bapak Dirjen Hubdat, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001

Tembusan Yth :

Kabag Perencanaan Setditjen Hubdat



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Iin Maelani, S. Kom	Penyusun Bahan Rencana dan Pelaporan		
2.	Diperiksa	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha		
3.	Disetujui	Rezki Satriya Suherman, SE	Kasubbag Tata Usaha		
4.	Disetujui	Ir. Marvian Dwi Surya Putra S.SiT., MM	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan		
5.	Disetujui	Dony Prasetyo, S.ST.	Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan		
6.	Disetujui	Dwi Hary Yulisetianto, S.SiT., M. Sc.	Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan		



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Banjar, Desember 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	11
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.200
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80

Kegiatan	Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 20.269.208.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 3.918.507.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 50.083.929.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 16.635.372.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 150.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.573.395.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 8.349.829.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
NRP. 66110433

Banjar, Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan


SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka mengakibatkan disesuaikan kembali Perjanjian kinerja pada bulan Desember Tahun 2024 dan penyesuaian anggaran berdasarkan Revisi 16 DIPA Nomor : SP DIPA-022.03.2.403855/2024 tanggal 14 November 2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan dengan Total Anggaran Rp.105.980.240.000,-

**TABEL SEMULA - MENJADI
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
 KELAS II KALIMANTAN SELATAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET (2023)	REALISASI (2023)	TARGET RENSTRA 2024	TARGET 2024 SEMULA	TARGET 2024 MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SK1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	100	100	100	100	Usulan tetap
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	1	1	1	1	Usulan tetap
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100	100	Usulan tetap
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	4	4	Usulan tetap
2	SK2 Meningkatkan Kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	90	90	90	Usulan tetap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET (2023)	REALISASI (2023)	TARGET RENSTRA 2024	TARGET 2024 SEMULA	TARGET 2024 MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100	100	Usulan tetap
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100	Usulan tetap
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	50	45	45	45	Usulan tetap
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	15	15	11	Usulan Berubah, Nilai target mengalami penurunan Capaian dari yang seharusnya ditargetkan dikarenakan kegiatan tersebut berdampak AA , sehingga dilakukan penyesuaian target kembali sesuai Capaian terakhir
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Usulan tetap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET (2023)	REALISASI (2023)	TARGET RENSTRA 2024	TARGET 2024 SEMULA	TARGET 2024 MENJADI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		keselamatan transportasi jalan							
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	90	90	95	95	95	Usulan tetap
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	1	1	Usulan tetap
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	85	85	85	87	Usulan Berubah dikarenakan Nilai target mengalami kenaikan Capaian dari yang seharusnya ditargetkan , sehingga dilakukan penyesuaian target kembali sesuai Capaian terakhir
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	80	80	80	80	Usulan tetap

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Kalsel	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,915,464,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,630,789,000	Seksi Prasarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,094,131,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,087,720,000	Seksi Prasarana

2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	1,630,789,000	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	1,087,720,000	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	34,323,126,000	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50	Operasional UPPKB Kintap	4.16	8.32	12.48	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.44	41.6	45.76	50	1,433,541,000	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5	8.75	10	11.25	12.5	13.75	15	4,880,040,000	Seksi Prasarana

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	Peikan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	350,000,000	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	7.91	15.82	23.73	31.64	39.55	47.46	55.37	63.28	71.19	79.1	87.01	95	260,700,000	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	Pengadaan Rambu Sungai	0.083	0.166	0.249	0.332	0.415	0.50	0.581	0.664	0.747	0.83	0.913	1	3,045,400,000	Seksi Lain
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7.08	14.16	21.24	28.32	35.4	42.48	50	56.64	63.72	70.8	77.88	85	3,813,450,000	- Seksi Lain - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.66	13.32	19.98	26.64	33.3	40	46.62	53.28	59.94	66.6	73.26	80	150,000,000	Subbag Tata Usaha

Banjar, 5 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Selatan





BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN

REVISI I

RENCANA AKSI

TAHUN 2024



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Kalimantan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,915,464,000	- Sekai Lalin - Sekai Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,630,789,000	Sekai Prasarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,094,131,000	- Sekai Lalin - Sekai Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,087,720,000	Sekai Prasarana

2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	BK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	260,700,000	Seksi Prasarana
		BK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	260,700,000	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	BK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	34,323,126,000	Seksi Lalin
		BK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	3.75	7.5	11.25	15	18.75	22.5	26.25	30	33.75	37.5	41.25	45	1,433,541,000	Seksi Prasarana
		BK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RAAS, dan batas kecepatan	Lokasi	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5	8.75	10	11.25	12.5	13.75	15	4,880,040,000	Seksi Prasarana

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	350,000,000	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	7.91	15.82	23.73	31.64	39.55	47.46	55.37	63.28	71.19	79.1	87.01	95	260,700,000	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	Pengadaan Rambu Sungai	0.083	0.166	0.249	0.332	0.415	0.50	0.581	0.664	0.747	0.83	0.913	1	3,045,400,000	Seksi Lalin
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7.06	14.16	21.24	28.32	35.4	42.48	50	56.64	63.72	70.8	77.88	85	3,813,450,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.66	13.32	19.98	26.64	33.3	40	46.62	53.28	59.94	66.6	73.26	80	150,000,000	Subbag Tata Usaha



REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional	%	100	Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Kaltel	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	4,915,464,000	- Sekai Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,630,789,000	Seksi Prasarana
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	3,873,131,000	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,087,720,000	Seksi Prasarana

2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	188,600,000	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	188,600,000	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	50	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	34,323,126,000	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	3.75	7.5	11.25	15	18.75	22.5	26.25	30	33.75	37.5	41.25	45	1,687,792,000	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	11	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	4,722,465,000	Seksi Prasarana

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1200	Pekan Nasional Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	350,000,000	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	7.91	15.82	23.73	31.64	39.55	47.46	55.37	63.28	71.19	79.1	87.01	95	208,230,000	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	1	Pengadaan Rambu Sungai	0.083	0.166	0.249	0.332	0.415	0.50	0.581	0.664	0.747	0.83	0.913	1	2,626,573,000	Seksi Lain
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7.08	14.16	21.24	28.32	35.4	42.48	50	56.64	63.72	70.8	77.88	85	3,813,450,000	- Seksi Lain - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.66	13.32	19.98	26.64	33.3	40	46.62	53.28	59.94	66.6	73.26	80	150,000,000	Subbag Tata Usaha

Banjar, Desember 2024
 Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
 Kalimantan Selatan


 SIGIT MINTARSO
 NIP. 19680130 199003 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. A. YANI, KM.17 (KOMP.
TERMINAL GAMBUT BARAKAT)
KAB. BANJAR 70236

TELP : (0511) 6776614

FAX : (0511) 6776614

Email :
bptdkalsek@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : SK-BPTDKALSEL 03 Tahun 2024**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SAKIP, E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
TAHUN 2024**

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023, diperlukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

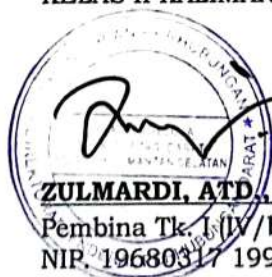
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip* Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.
- KEDUA** : Tim penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-022.03.2.403855/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n j a r
Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



ZULMARDI, A.T.D., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680317 199103 1 002

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalsel

Nomor : SK-BPTDKALSEL 03 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

**TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

- Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan
- Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha
- Sekretaris : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, dan Penyeberangan
3. Agung Laksono Putra, A. Md LLAJ
4. Iin Maelani, S.Kom
5. M. Efendi, S.P
6. Rizki Azkiya, S.Pd

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



Lampiran II Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalsel

Nomor : SK-BPTDKALSEL 03 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

URAIAN TUGAS

**TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN SELATAN**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim penyusun dalam penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan e-Sakip Reviu kepada Penanggung Jawab;

3. Sekretaris mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip Reviu*;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip Reviu*;
 - Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip Reviu*;
 - Melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), *e-Performance* dan *e-Sakip Reviu* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
4. Anggota mempunyai tugas:
- Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen SAKIP dan, *e-Performance* dan *e-Sakip Reviu*;
 - Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. A. YANI, KM.17 (KOMP.
TERMINAL GAMBUT BARAKAT)
KAB. BANJAR 70236

TELP : (0511) 6776614

FAX : (0511) 6776614

Email :
bptdkalsel@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : SK-BPTDKALSEL 04 Tahun 2024**

TENTANG

**TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023, diperlukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023;

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I Keputusan** ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Keputusan** ini.

KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-022.03.2.403855/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n j a r
Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



Lampiran I Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalsel

Nomor : SK-BPTDKALSEL 04 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

**TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Selatan

Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha

Sekretaris : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai,
Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan

Anggota : 1. Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
2. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,
Sungai, dan Penyeberangan
3. Agung Laksono Putra, A. Md LLAJ
4. Dinda Ramawati, A.Md
5. Fauzi Arka Putri Wibisono, S.ST
6. Fanny Ika Saraswati, ST

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



Lampiran II Keputusan Kepala BPTD Kelas II Kalsel

Nomor : SK-BPTDKALSEL 04 Tahun 2024

Tanggal : 5 Januari 2024

**URAIAN TUGAS
TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - b. Memberikan arahan, masukan dan saran kepada tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - c. Menetapkan target dan capaian kinerja;
 - d. Mengesahkan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target dan capaian kinerja.
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi dokumen: Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Monitoring Triwulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan tim Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi Mandiri Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* kepada Penanggung Jawab;
3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan data kinerja sebagai bahan untuk Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Evaluasi Mandiri Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - c. Membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance*;
 - d. Melakukan inventarisasi hasil Evaluasi Mandiri dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan *e-Performance* dari seluruh anggota Tim Penyusun Dokumen SAKIP.
4. Anggota mempunyai tugas:
- a. Menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait Evaluasi Mandiri dokumen SAKIP dan *e-Performance*;
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap triwulan, akhir tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

KEPALA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JANUARI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.3	100	4,880,040,000	100	8.3	0	100	0.00	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis tiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	3,918,509,000	100	1	137,338,350	100	3.50	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8.3	100	4,094,131,000	100	8.3	0	100	0.00	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	41,645,350	100	3.83	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	7.5	100	3,918,509,000	100	7.5	137,338,350	100	3.50	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	8.3	100	1,087,720,000	100	8.3	41,645,350	100	3.83	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	8.3	100	34,323,126,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Masih dalam tahap persiapan kegiatan lelang kontraktual	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	3.75	100	1,433,541,000	100	3.75	60,353,000	100	4.21	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	1.25	100	4,880,040,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Masih dalam tahap persiapan kegiatan lelang kontraktual	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	7.91	100	89,440,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Januari belum ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.083	100	3,045,400,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan masih dalam tahap persiapan lelang kegiatan kontraktual	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		% Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7.08	100	3,813,450,000	100	7.08	0	100	0.00	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Melakukan Pengiriman pegawai diklat 2. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 3. Melakukan Penyusunan saki, spip, lkip, profil bptd 4. Melakukan Rapat teknis/ koordinasi/ konsolidasi 5. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	6.66	100	4,384,645,000	100	6.66	684,120,628	100	15.60	TERCAPAI	Managemen terhadap SDM pegawai BPTD Kalsel	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	16.6	100	4,915,464,000	100	16.6	343,279,239	100	6.98	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	158,425,766	100	9.71	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	16.6	100	4,094,131,000	100	16.6	0	100	0.00	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	266,305,880	100	24.48	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	15	100	1,630,789,000	100	15	158,425,766	100	9.71	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	16.6	100	1,087,720,000	100	16.6	266,305,880	100	24.48	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	16.6	100	34,323,126,000	100	16.6	0	100	0.00	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	8.32	100	1,423,541,000	100	8.32	179,295,768	100	12.60	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	2.5	100	4,880,040,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Masih dalam tahap persiapan kegiatan lelang kontraktual	Seksi Lalin
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	15.82	100	260,700,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	1. Pada Bulan Januari belum ada permohonan masuk kalibrasi alat uji pada dishub kab/kota sekalsel 2. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.16	100	3,045,400,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan masih dalam tahap persiapan lelang kegiatan kontraktual	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		% Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	14.16	100	3,813,450,000	100	14.16	319,390,470	100	8.38	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Melakukan Pengiriman pegawai diklat 2. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 3. Melakukan Penyusunan saki, spip, lkip, profil bptd 4. Melakukan Rapat teknis/ koordinasi/ konsolidasi 5. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	13.32	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MARET TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	25	100	4,915,464,000	100	25	711,468,757	100	14.47	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis ditiaj bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	240,741,766	100	14.76	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	25	100	4,094,131,000	100	25	0	100	0.00	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	301,125,880	100	27.68	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	22.5	100	1,630,789,000	100	22.5	240,741,766	100	14.76	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	25	100	1,087,720,000	100	25	301,125,880	100	27.68	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	25	100	34,323,126,000	100	25	4,866,696,000	100	14.18	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	12.48	100	1,423,541,000	100	12.48	221,376,768	100	15.55	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	3.75	100	4,880,040,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Masih dalam tahap persiapan kegiatan lelang kontraktual	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	23.75	100	260,700,000	100	23.75	7,750,353	100	2.97	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Penda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.16	100	3,045,400,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan masih dalam tahap persiapan lelang kegiatan kontraktual	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	21,25	100	3,813,450,000	100	21.25	319,390,470	100	8.38	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Melakukan Pengiriman pegawai diklat 2. Melakukan Penyusunan bahan, rencana kerja dan anggaran 3. Melakukan Penyusunan sakip, spip, lkip, profil bptd 4. Melakukan Rapat teknis/ koordinasi/ konsolidasi 5. Melakukan Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	19.98	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN APRIL TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	33.2	100	4,915,464,000	100	33.2	1,134,663,401	100	23.08	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis ditiaj bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	576,462,211	100	35.35	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	33.2	100	4,094,131,000	100	33.2	500,138,310	100	12.22	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3.Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	473,308,229	100	43.51	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	33.2	100	1,630,789,000	100	33.2	576,462,211	100	35.35	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	100	100	1,087,720,000	100	100	473,308,229	100	43.51	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	33.2	100	34,323,126,000	100	33.2	8,563,090,800	100	24.95	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	16.64	100	1,423,541,000	100	16.64	412,082,936	100	28.95	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkn	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	5	100	4,880,040,000	100	5	1,117,701,600	100	22.90	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Pembangunan ZoSS 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	31.64	100	260,700,000	100	31.64	106,566,903	100	40.88	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ahur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.33	100	3,045,400,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan masih dalam tahap persiapan lelang kegiatan kontraktual	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-4				Realisasi Bulan-4		% Capaian Bulan-4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	28.32	100	3,813,450,000	100	28.32	1,416,792,910	100	37.15	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	26.64	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MEI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	41.5	100	4,915,464,000	100	41.5	1,522,959,685	100	30.98	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	682,027,509	100	41.82	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	41.5	100	4,094,131,000	100	41.5	1,134,545,222	100	27.71	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	574,819,129	100	52.85	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%							
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	100	100	1,630,789,000	100	100	682,027,509	100	41.82	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	100	100	1,087,720,000	100	100	574,819,129	100	52.85	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	41.5	100	34,323,126,000	100	41.5	11,190,955,900	100	32.60	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	18.75	100	1,423,541,000	100	18.75	469,523,489	100	32.98	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	6.25	100	4,880,040,000	100	6.25	1,330,101,600	100	27.26	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Pembangunan ZoSS 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan dibulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	39.55	100	260,700,000	100	39.55	107,016,903	100	41.05	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Penda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.41	100	3,045,400,000	100	0	787,906,399	100	25.87	TERCAPAI	1.telah kontrak kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-5				Realisasi Bulan-5		% Capaian Bulan-5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	35.4	100	3,813,450,000	100	35.4	1,610,869,218	100	42.24	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	26.64	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JUNI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	50	100	4,915,464,000	100	50	1,891,857,715	100	38.49	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	705,265,509	100	43.25	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	50	100	4,094,131,000	100	50	1,134,545,222	100	27.71	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	603,710,817	100	55.50	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	45	100	1,630,789,000	100	81.25	705,265,509	181	43.25	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan smp	%	100	Monitoring dan pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	50	100	1,087,720,000	100	100	603,710,817	200	55.50	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	50	100	34,323,126,000	100	50	24,481,650,700	100	71.33	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	25	100	1,423,541,000	100	25	505,356,427	100	35.50	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	7.25	100	4,880,040,000	100	9	1,577,901,600	124.14	32.33	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Pembangunan ZoSS 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	300,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan minggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Kalibrasi Alat Uji PKB	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	47.5	100	260,700,000	100	38.46	107,016,903	81	41.05	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Penda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	50	100	3,045,400,000	100	0	787,906,399	0	25.87	BELUM TERCAPAI	1.telah kontrak kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei namun masih tahap persiapan pelaksanaan kegiatan 2. akan dilakukan pemantauan dan	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-6				Realisasi Bulan-6		% Capaian Bulan-6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	50	100	3,813,450,000	100	50	1,984,287,924	100	52.03	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	50	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JULI TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-7				Realisasi Bulan-7		% Capaian Bulan-7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	58.1	100	4,915,464,000	100	58.1	2,237,543,671	100	45.52	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	943,836,553	100	57.88	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-7				Realisasi Bulan-7		% Capaian Bulan-7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	58.1	100	4,094,131,000	100	58.1	1,134,545,222	100	27.71	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	722,651,896	100	66.44	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-7				Realisasi Bulan-7		% Capaian Bulan-7		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	50	100	3,813,450,000	100	50	2,420,859,917	100	63.48	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	50	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-8				Realisasi Bulan-8		% Capaian Bulan-8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	66.4	100	4,915,464,000	100	66.4	2,237,543,671	100	45.52	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	943,836,553	100	57.88	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-8				Realisasi Bulan-8		% Capaian Bulan-8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	66.4	100	4,094,131,000	100	66.4	1,134,545,222	100	27.71	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	722,651,896	100	66.44	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-8				Realisasi Bulan-8		% Capaian Bulan-8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Terminal Tipe-A	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Terminal Tipe A	Monitoring Pengendalian Prasarana	60	100	260,700,000	100	60	84,249,000	100	32.32	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan samudra	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	66.4	100	260,700,000	100	66.4	84,249,000	100	32.32	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	66.4	100	34,323,126,000	100	66.4	26,469,527,152	100	77.12	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	30	100	1,423,541,000	100	30	607,074,927	100	42.65	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	10	100	4,722,465,000	100	10	2,448,236,800	100	51.84	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Pembangunan ZoSS 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	300,000,000	100	0	0	0.000	0.00	BELUM TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan diperkirakan akan dilaksanakan diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	63.28	100	260,700,000	100	63.28	135,945,000	100	52.15	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUJBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	0.58	100	3,045,400,000	100	0.58	1,707,130,531	100	56.06	TERCAPAI	1.telah kontrak kegiatan pada minggu ketiga bulan Mei namun masih tahap persiapan pelaksanaan kegiatan 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-8				Realisasi Bulan-8		% Capaian Bulan-8		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	56.64	100	3,813,450,000	100	56.64	2,420,859,917	100	63.48	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	53.28	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		% Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	75	100	4,915,464,000	100	75	2,982,099,715	100	60.67	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	1,067,292,967	100	65.45	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		% Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	75	100	4,094,131,000	100	79.12	1,512,485,013	105	36.94	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	826,327,810	100	75.97	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		% Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Terminal Tipe-A	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Terminal Tipe A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	81.25	100	260,700,000	100	81.25	103,334,000	100	39.64	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	100	100	260,700,000	100	100	103,334,000	100	39.64	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	100	100	34,323,126,000	100	100	27,311,040,308	100	79.57	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	33.75	100	1,459,427,000	100	33.75	734,557,005	125	50.33	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	15	100	4,722,465,000	100	15	4,500,778,876	100	95.31	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai pada pembangunan ZoSS di 15 Lokasi	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	350,000,000	100	1200	349,239,300	100	99.78	TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan telah terlaksana diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	71.19	100	177,030,000	100	77	141,814,403	108	80.11	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	1	100	2,626,573,000	100	1.00	2,626,354,663	100	99.99	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		% Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	100	3,813,450,000	100	87	3,113,783,930	102	81.65	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	60	100	150,000,000	100	0	0	0	0.00	BELUM TERCAPAI	Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran akan segera dilakukan	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN OKTOBER TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	83	100	4,915,464,000	100	83	3,385,521,159	100	68.87	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	1,185,162,627	100	72.67	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	83	100	4,094,131,000	100	83	1,981,436,934	100	48.40	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	826,327,810	100	75.97	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Terminal Tipe-A	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Terminal Tipe A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	81.25	100	260,700,000	100	81.25	163,970,000	100	62.90	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	100	100	260,700,000	100	100	163,970,000	100	62.90	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	100	100	34,323,126,000	100	100	27,311,040,308	100	79.57	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	37.5	100	1,459,427,000	100	37.5	734,557,005	125	50.33	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	15	100	4,722,465,000	100	15	4,500,778,876	100	95.31	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai pada pembangunan ZoSS di 15 Lokasi	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanal	1200	100	350,000,000	100	1200	349,239,300	100	99.78	TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan telah terlaksana diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	79.1	100	177,030,000	100	79.1	144,064,353	100	81.38	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	1	100	2,626,573,000	100	1.00	2,626,354,663	100	99.99	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	100	3,813,450,000	100	87	3,389,069,053	102	88.87	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	66	100	150,000,000	100	66	150,000,000	100	100.00	TERCAPAI	Telah dilakukan Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	91,3	100	4,915,464,000	100	91,3	4,176,787,507	100	84.97	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Ritase Capaian Angkutan Perintis setiap bulannya.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	1,490,892,238	100	91.42	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	91.3	100	4,094,131,000	100	91.3	3,370,253,401	100	82.32	TERCAPAI	1. Telah Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas 2. akan dilaksanakan pemantauan dan monitoring rutin terhadap Trip Capaian Angkutan Penyeberangan Perintis ditiap bulannya. 3. Melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar fungsi berjalan dengan benar.	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	826,327,810	100	75.97	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Terminal Tipe-A	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Terminal Tipe A	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	82.5	100	260,700,000	100	82.5	173,572,500	100	66.58	TERCAPAI	Melakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	100	100	260,700,000	100	100	173,572,500	100	66.58	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	100	100	28,510,188,000	100	100	27,399,141,308	100	96	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	35	100	1,459,427,000	100	35	1,339,010,886	125	91.75	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilanorkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	12	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	12	100	4,722,465,000	100	12	4,571,578,876	100	96.80	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai pada pembangunan ZoSS di 15 Lokasi	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	350,000,000	100	1200	349,239,300	100	99.78	TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan telah terlaksana diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat	87	100	186,725,000	100	87	186,725,000	100	100	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	1	100	2,626,573,000	100	1.00	2,626,354,663	100	99.99	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-10				Realisasi Bulan-10		% Capaian Bulan-10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	87	100	3,813,450,000	100	87	3,515,645,504	100.0	92.19	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	73	100	150,000,000	100	73	150,000,000	100	100	TERCAPAI	Telah dilakukan Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran	Subbag Tata Usaha

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kalsel	Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	4,915,464,000	100	100	4,817,217,000	100	98.00	TERCAPAI	1. Telah Selesai Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 6 Trayek	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lok	1	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	1	100	1,630,789,000	100	1	1,574,924,795	100	96.57	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal tipe-A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A. 4. Memantau Data Produksi Angkutan yang telah dilaporkan	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	100	100	3,873,131,000	100	100	3,866,954,313	100	99.84	TERCAPAI	1. Telah Selesai Kontrak Kegiatan untuk memberikan subsidi angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut sebanyak 1 Lintas	- Seksi Lalin - Seksi Sarana
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lok	4	Operasional Pelabuhan SDP	Jumlah Pelabuhan SDP dikelola	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100	1,087,720,000	100	4	826,327,810	100	75.97	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan penyeberangan. 4. Memantau Data Produksi Angkutan Penyeberangan yang telah	Seksi Prasarana

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
2.	SK2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Terminal Tipe-A	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Terminal Tipe A	Monitoring dan Pengendalian Prasarana	81.25	100	188,600,000	100	81.25	173,572,500	100	92.03	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM terminal;	Seksi Prasarana
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan	Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	100	100	188,600,000	100	100	173,572,500	100	92.03	TERCAPAI	Telah dilakukan Monitoring terhadap SPM Pelabuhan;	Seksi Prasarana
3.	SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan	100	100	34,323,126,000	100	100	28,497,482,108	100	83.03	TERCAPAI	1. Telah dilakukan kontrak kegiatan terhadap Faskes di Jalan Nasional Provinsi Kalsel 2. akan dilakukan pemantauan dan monitoring progress kegiatan dilapangan	Seksi Lalin
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	45	Operasional UPPKB Kintap	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola	Operasional UPPKB	45	100	1,767,792,000	100	45	1,403,940,176	100	79.42	TERCAPAI	1. akan dilaksanakan rutin pengawasan dan penindakan pelanggaran pada satpel UPPKB 2. Memantau Data Produksi pelanggaran yang telah dilanorkan	Seksi Prasarana
		IKK3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lok	11	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	11	100	4,722,465,000	100	11	4,722,462,476	100	100.00	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai pada pembangunan ZoSS di 11 Lokasi	Seksi Lalin
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Org	1200	Pekan Keselamatan Jalan	Jumlah Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Penyelenggaraa n Pekan Keselamatan Nasioanl	1200	100	350,000,000	100	1200	349,239,300	100	99.78	TERCAPAI	Kegiatan Pekan Keselamatan telah terlaksana diminggu pertama bulan September	Seksi Sarana
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	95	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB	Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan	95	100	208,230,000	100	95	167,327,853	100	80.36	TERCAPAI	1. Meningkatkan pelaksanaan standarisasi pengujian berkala Kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) ke semua Pemda Prov/Kab/Kota 2. akan terus melaksanakan Kalibrasi alat uji PKB pada instansi yg telah mengajukan permohonan ke BPTD	Seksi Sarana
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lok	1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai	Rambu Sungai dan Danau	1	100	2,626,573,000	100	1.00	2,626,354,663	100	99.99	TERCAPAI	Kegiatan telah selesai	Seksi Lalin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		% Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Vol	%	Vol	%	Volume	Volume	%	%			
4.	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	85	100	3,813,450,000	100	87	3,563,468,027	102.4	93.44	TERCAPAI	Telah terlaksana kegiatan Tupoksi : 1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan 2. Monitoring Pengelolaan Sarana Dan Angkutan 3. Monitoring Pengendalian Sarana Dan Angkutan 4. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana 5. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas 6. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas 7. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas Dan Angkutan	- Seksi Lalin - Seksi Sarana - Seksi Prasarana - Subbag Tata Usaha
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	80	100	150,000,000	100	80	150,000,000	100	100.00	TERCAPAI	Telah dilakukan Pengadaan terhadap Fasilitas penunjang layanan perkantoran	Subbag Tata Usaha